

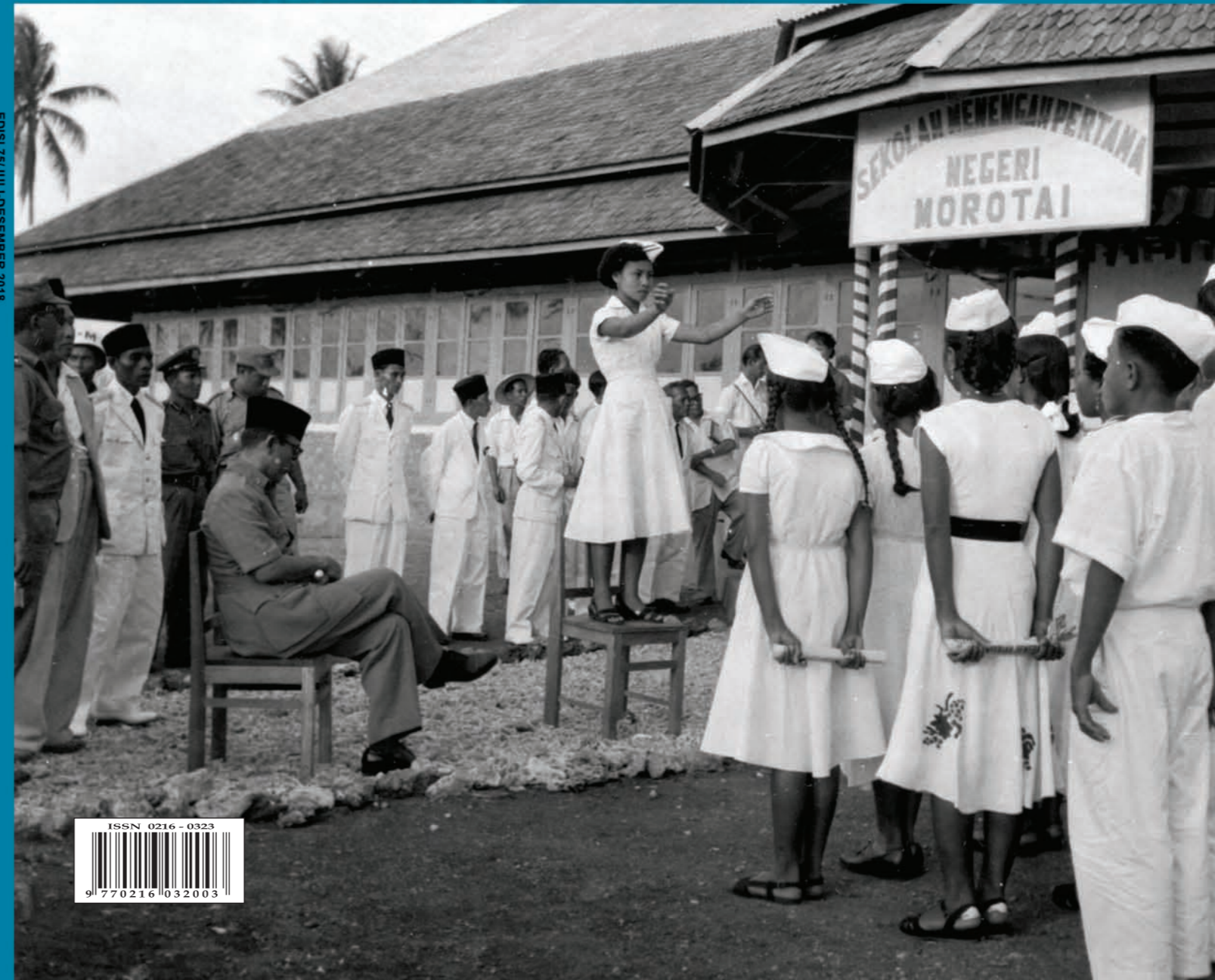
PEMBANGUNAN MANUSIA

UNDUH MAJALAH ARSIP DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format* (PDF) dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat



Mitra Terpercaya dalam Pengelolaan Arsip



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi:

- Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan;
- Pembenahan arsip;
- Pemeliharaan dan perawatan arsip;
- Penyimpanan arsip.

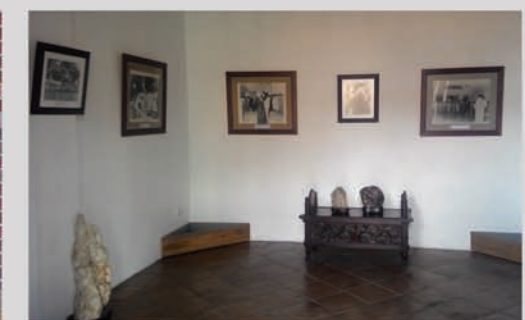
Informasi Lebih Lanjut
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
12560 - Indonesia
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812
Email : pusat.jasa@gmail.com
www.jasakearsipan.anri.go.id



KUNJUNGI... GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



DAFTAR ISI



5 PEMBANGUNAN MANUSIA MOMENTUM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEARSIPAN

Manusia memiliki peranan yang sangat strategis dalam kemajuan sebuah bangsa. Oleh karenanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi skala prioritas dalam segala bidang. Terlebih Indonesia akan memiliki bonus demografi dengan usia muda yang melimpah.

DARI REDAKSI ————— **4**

KHAZANAH ————— **19**

TRANSMIGRASI (KOLONISASI) PERTAMA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

PRESERVASI ————— **22**

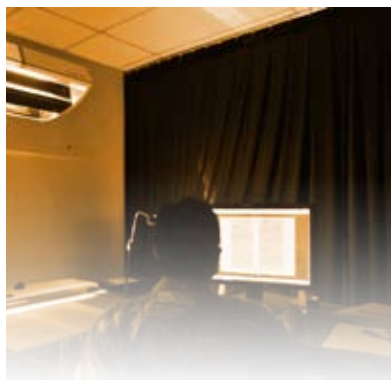
PENYELAMATAN ARSIP BENCANA DI SULAWESI TENGAH

PROFIL ————— **26**

PROF. DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI, PH.D EKONOM-DIPLOMAT YANG TAMPIL SAAT KRISIS

MANCANEGARA ————— **29**

FINLANDIA, "A COUNTRY OF READERS"



9 ARSIPARIS MASA DEPAN

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin maju, tentu saja menuntut kompetensi yang semakin tinggi dari seorang arsiparis. Dahulu arsip hanya tercipta di atas kertas, kemudian berkembang lagi dalam media audio, audio-visual dan saat ini dalam bentuk elektronik/*e-records*.

HUKUM ————— **33**

ANGIN SEGAR PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

TEKNOLOGI ————— **36**

REVOLUSI DIGITAL DI DUNIA ARSIP

CERITA KITA ————— **38**

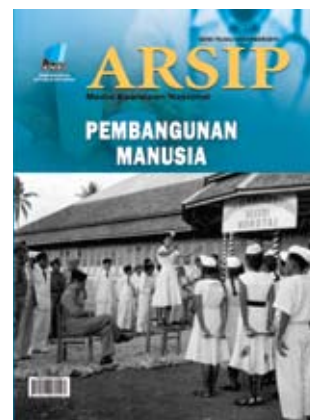
ARSIP RAPI, MENENANGKAN HATI

LIPUTAN ————— **40**



12 INDONESIA BEBAS BUTA HURUF SEBUAH CITA-CITA BANGSA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN

Sebenarnya upaya pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam bidang pendidikan, sudah dimulai tak lama setelah Indonesia merdeka. Sebagai sebuah negara yang pernah mengalami kolonialisme, tentunya masih banyak yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk terus memperjuangkan dan menggapai cita-cita bangsa.



Cover Designer : Isanto

KETERANGAN COVER

Peresmian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri Morotai,
03 September 1957
Sumber: ANRI, Kempen 570903 V V 16

Pembina:

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

M. Imam Mulyantono

Pemimpin Redaksi:

Gurandhyka

Wakil Pemimpin Redaksi:

Rosnarjo

Dewan Redaksi:

Azmi, Hilman Rosmana,
M. Ihwan,
Bambang Parjono Widodo,

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian,
Susanti,
Mudanto Pamungkas

Editor:

Dhani Sugiharto,
Aria Maulana,
Rayi Darmagara,
R. Suryagung Sudibyo P,
Intan Lidwina,
Annawaty Betawinda,
Erieka Nurlidya,
Khoerun Nisa Fadillah,

Fotografer:

Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Desain Grafis:

Beny Oktavianto
Isanto

Sekretariat:

Yuanita Utami,
Krestiana Evelyn

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id



Rapat Tim Redaksi

Manusia memiliki peranan yang sangat strategis dalam kemajuan sebuah bangsa. Oleh karenanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi skala prioritas dalam segala bidang. Terlebih Indonesia akan memiliki bonus demografi dengan usia muda yang melimpah. Hal itu dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Bonus demografi ini harus dioptimalkan dengan baik, apalagi Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima pada tahun 2045. Dengan penduduk yang besar memberikan sebuah kesempatan untuk mengejar tujuan pembangunan yang dicita-citakan, maka investasi di bidang manusia menjadi prioritas dalam pembangunan.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Arsip dan Pembangunan Manusia yang meliputi bahasan mengenai kebijakan pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Redaksi juga membahas pembangunan manusia pada aspek bidang kearsipan.

Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Profil, Rubrik Hukum, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi

PEMBANGUNAN MANUSIA

MOMENTUM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEARSIPAN INDONESIA

Manusia memiliki peranan yang sangat strategis dalam kemajuan sebuah bangsa. Oleh karenanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi skala prioritas dalam segala bidang. Terlebih Indonesia akan memiliki bonus demografi dengan usia muda yang melimpah. Hal itu dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Bonus demografi ini harus dioptimalkan dengan baik, apalagi Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima pada tahun 2045.

“Dengan penduduk yang besar memberikan semacam kesempatan untuk mengejar tujuan pembangunan yang kita capai, maka investasi di bidang manusia jadi prioritas pemerintah sampai tahun 2045”, tutur

Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada saat memberikan kuliah umum dalam acara Simposium Cendekia Kelas Dunia 2018, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta (13/08).

Sebagaimana telah diamanatkan konstitusi, negara berkewajiban menyisihkan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM bangsa. Belanja pendidikan terus mengalami peningkatan secara signifikan dari sekitar Rp 208 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 444,1 triliun di tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangatlah memberikan perhatian yang lebih terhadap pembangunan manusia.

Selain pendidikan, Pemerintah juga investasi di bidang kesehatan

guna mewujudkan manusia Indonesia sehat. Sejak tahun 2015, alokasi anggaran kesehatan mencapai 5 persen dari APBN untuk mendanai program Indonesia sehat, program Keluarga Berencana (KB), sertifikasi obat dan makanan, imunisasi, pencegahan stunting, dan lain-lain.

“Ya, *stunting* itu sebagai anak kerdil, artinya pertumbuhannya kurang baik, tapi permasalahannya bukan karena pendek saja, tetapi perkembangan otaknya itu kurang baik. Oleh karena itu, nanti daya saingnya kedepan menimbulkan permasalahan di depan, orang yang dengan permasalahan stunting pada waktu dewasanya, lebih banyak misalnya salah satunya adalah menderita penyakit yang tidak menular-jadi obesitas, kemudian penyakit-penyakit lain yang memang jadi permasalahan dikemudian



Plt. Kepala BKKBN, Sigit Prihutomo



Yudi Latif cendekiawan dan penulis Buku Negara Paripurna

hari. Oleh karena itu, harapan kita tidak menjadi masalah dan menjadi generasi yang baik, dan menjadi daya saing yang kuat”, ungkap Plt. Kepala BKKBN, Sigit Prihutomo pada acara Telaah Tengah Tahun Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel El Royal, Kelapa Gading, Jakarta (21/09).

Sigit Prihutomo juga menyampaikan upaya BKKBN dalam mencapai kualitas SDM melalui sasaran strategis dan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) pada Tahun 2018. Kebijakan KKBPK dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik yang merata di setiap wilayah dan kelompok masyarakat kebijakan tersebut dijabarkan dalam strategi KKBPK yaitu, pertama, menguatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

Kedua, meningkatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ketiga, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka

menyiapkan kehidupan berkeluarga dan meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga, menguatkan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan bidang pendudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah. Kemudian meningkatkan data dan informasi berbasis keluarga menurut nama dan alamat yang akurat, terkini dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus pengembangan kebijakan dan program lainnya.

“Oleh karena itu, untuk bisa melihat sejarah dari pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia ini, kita harus lestarikan dan harus kita simpan. dan saya cukup bangga, sangat bangga bahkan, bahwa bagian dari pada yang tercatat di dalam arsip itu dalam kepemimpinan BKKBN”, terang Sigit.

Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI (16/8) menyampaikan mengenai pentingnya pembangunan manusia di era pemerintahan saat ini. “Fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun

terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki”, tutur Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menambahkan bahwa membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. “Kita persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Komitmen ini kita wujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa”, terangnya.

Selain pemerataan akses dan kualitas pendidikan, untuk membangun manusia Indonesia yang sehat pemerintah menggalakkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk memberikan perlindungan



Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 di Istana Merdeka, Jakarta (2018/08/17/Dok. Humas ANRI)

sosial bagi warga yang tidak mampu, Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

“Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori *High Human Development*”, ungkap Jokowi.

Pendidikan merupakan tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan

berkarakter. “Jadi bicara karakter itu kan, bicara sejarah. Sejarah dari Bahasa Arab artinya pohon. Perjalanan bangsa ini akan kuat, sebagai pohon kehidupan, kalau bertumbuh pada akar-akar yang kuat, dengan akar yang kuat muncul satu kehidupan yang kokoh, baru cabang dan ranting-ranting yang rindang, itu buahnya juga lebat, artinya apa, tidak mungkin suatu bangsa itu bisa memiliki karakter yang kuat, tanpa menghargai warisan-warisan terbaik masa lalunya. Warisan-warisan terbaik masa lalu itu tersimpan di dalam arsip, tersimpan di dalam naskah, tersimpan di dalam relief, tersimpan di dalam artefak-artefak budaya”, tutur Yudi Latif cendekiawan dan penulis Buku Negara Paripurna saat ditemui wartawan Majalah ARSIP setelah acara Festival Naskah Nusantara IV, di Perpustakaan

Nasional, Jakarta (21/09).

Dalam empat tahun ini, Pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, Pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital.

Melihat strategisnya pendidikan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan mewujudkan SDM berkualitas, Arsip Nasional Republik Indonesia menyambut baik tawaran kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) terkait dengan rencana membuka program pembibitan

LAPORAN UTAMA

arsiparis. Program pembibitan Arsiparis ini bertujuan untuk menciptakan SDM kearsipan yang kompeten dan profesional di bidang kearsipan.

Ketua STIA LAN, Makhdom Priyatno, mengungkapkan beberapa hal yang melatarbelakangi pembukaan program pembibitan Arsiparis melalui studi kearsipan di STIA LAN. “Dua hal yang melatarbelakangi, pertama pernyataan pak Menpan saat itu pak Asman tentang kebutuhan Arsiparis dan yang kedua komitmen pimpinan yaitu program pembibitan Arsiparis”, ujarnya. Menurut Makhdom Priyatno, kearsipan dewasa ini dapat menjadi faktor pendukung dalam menghadapi revolusi industri 4.0. “ANRI memiliki momentum yang sangat bagus terkait dengan revolusi industri 4.0 bukan berbicara peran arsip dalam revolusi industri, tetapi arsip sebagai *enabler factor* (faktor pendukung) sebagai suksesnya revolusi industri 4.0 artinya jangan sampai terjadi masalah-masalah hukum karena lemah dalam bidang manajemen arsip, sehingga kita baru *nggeh* (red: sadar) ketika kejadian karena kita tidak antisipatif. Teknologi informasi itu sudah sangat maju sehingga menurut saya kedepan arsip akan punya gaung dan nilai tambah yang disadari pentingnya oleh semua kalangan. Sudah terbayang nanti mendidik Arsiparis itu menjadi arsip milenial pada era elektronik”, terang Makhdom.

Sementara, upaya ANRI dalam pembangunan manusia kearsipan antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti: bimbingan teknis kearsipan, bimbingan konsultasi, penyuluhan kearsipan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kearsipan dan pelaksanaan magang. Guna menjamin standar kompetensi Arsiparis, maka



Kepala ANRI, Mustari Irawan saat memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis SDM Kearsipan di Perpustakaan Nasional, Jakarta (5/11)




Ketua STIA LAN, Makhdom Priyatno

ANRI mempunyai kewenangan untuk melakukan Sertifikasi Arsiparis melalui Uji Kompetensi Kearsipan baik pada kompetensi jabatan dan kompetensi bidang teknis tertentu di bidang kearsipan.

Kepala ANRI, Mustari Irawan menyampaikan pandangannya bahwa Arsiparis diharapkan memiliki beberapa hal kompetensi guna menghasilkan kinerja kearsipan yang berkualitas dan profesional. “Seseorang Arsiparis harus memiliki kompetensi

teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural”, terangnya dalam acara Bimbingan Teknis SDM Kearsipan di Perpustakaan Nasional, Jakarta (05/11).

Tantangan SDM Kearsipan di era revolusi industri 4.0 ini, sangatlah kompleks. Arsip-arsip yang tercipta bukan saja arsip-arsip konvensional, melainkan arsip-arsip yang dari awal penciptaannya sudah elektronik, ataupun dengan media elektronik. Ke depan, SDM Kearsipan juga dituntut untuk mengikuti dan memahami perkembangan teknologi. Dunia kearsipan akan mengalami pergeseran pengelolaan, dari cara-cara konvensional ke arah yang lebih modern. Adalah menjadi tugas ANRI selaku pembina kearsipan nasional dan para pengemban tugas terkait untuk mempersiapkan SDM Kearsipan berdaya saing global dan memiliki kompetensi guna menghadapi pengelolaan kearsipan 4.0. (bwp/is)



Susanti

ARSIPARIS MASA DEPAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, tidak luput dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Trend bagi Indonesia 5 (lima) tahun kedepan diantaranya adalah 5th G, blockchain and shared ledgers, 3D printing, assistive technologies, artificial intelligence and machine learning, internet of things, mobile payment dan digital healthcare. Semua serba menggunakan elektronik. Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat mengikuti trend tersebut. Artinya bahwa masyarakat Indonesia, khususnya sdm usia produktif di Indonesia harus mengembangkan kemampuannya dalam bekerja sehingga tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi dunia, tidak luput didalamnya adalah arsiparis.

Arsiparis merupakan jabatan fungsional yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola arsip, menjamin keselamatan dan keutuhan arsip, membina kearsipan, memberikan layanan arsip dan hal-hal lain yang terkait dengan kearsipan. Arsiparis dapat dikatakan sebagai jabatan fungsional yang strategis, karena seorang arsiparis dapat berada di instansi mana saja, seperti Kementerian, Lembaga Negara, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi Negeri serta Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik. Selain itu, arsiparis tidak hanya dibutuhkan di unit kearsipan, setiap unit kerja membutuhkan keberadaan arsiparis, karena sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap unit kerja dapat dipastikan memiliki arsip untuk dikelola dengan baik.

Tanggungjawab seorang arsiparis sangat besar, sehingga tidak bisa tanpa standar kriteria dalam mengangkat/

melantik seseorang untuk menjadi arsiparis. Hal ini yang sepertinya masih sering kurang diperhatikan, sehingga masih banyak pegawai yang di *non job* kan diangkat menjadi arsiparis. Hal ini terjadi di beberapa tempat baik di lingkup propinsi maupun kabupaten/kota. Padahal untuk menjadi seorang arsiparis, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian yang terjadi adalah mayoritas dari mereka tidak mengelola arsip yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Mereka hanya datang ke kantor untuk memenuhi kewajiban akan absensi/ daftar hadir. Apabila hal ini dibiarkan, maka kondisi arsip akan memburuk karena tidak ada yang memperdulikan.

Kasus lain yang terjadi adalah ketika seseorang dianggap kinerjanya buruk/ tidak disukai pimpinan, maka

ia akan dipindahkan ke unit kearsipan dan menjadi arsiparis disana. Atau ketika seseorang mendekati usia pensiun, untuk memperpanjang usia pensiunnya maka ia diangkat menjadi arsiparis. Beberapa contoh tersebut, tentu menjadi kondisi yang sangat memprihatinkan khususnya bagi dunia kearsipan di Indonesia. Bagaimana mungkin arsipnya terkelola dengan baik apabila tidak dilakukan oleh sumber daya manusia yang handal, yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Dalam hal ini, dibutuhkan juga orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya, sehingga semua akan dilakukan dengan sepenuh hati dan hasilnya akan baik.

Padahal sebagaimana kita ketahui arsiparis merupakan salah satu profesi yang menuntut keahlian dalam pengarsipan. Dalam pengelolaan arsip dinamis, seorang arsiparis dituntut untuk bisa melakukan kegiatan penataan arsip dinamis aktif dan inaktif. Bukan hanya dalam pemberkasan dan penataannya, seorang arsiparis juga harus mampu membuat daftar arsip aktif dan inaktif serta mengolahnya menjadi informasi. Selain itu seorang arsiparis juga dituntut untuk dapat menata dan mengolah arsip statis/permanen. Seorang arsiparis juga harus mengetahui prosedur dan mampu melakukan penyusutan arsip mulai dari pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis. Kemampuan dalam melakukan penilaian dan akuisisi arsip juga harus dimiliki arsiparis. Kompetensi lain yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis adalah untuk melakukan pembinaan dan pemanfaatan arsip, seorang arsiparis juga harus bisa membuat tulisan/

naskah sumber arsip karena sedianya arsip disimpan dan dipelihara untuk diketahui informasi yang tersimpan didalamnya oleh masyarakat luas. Masih banyak lagi kemampuan yang harus dimiliki seorang arsiparis seperti wawancara sejarah lisan, pengolahan arsip, preservasi arsip dan membuat tools yang dapat memudahkan publik dalam mengakses arsip statis dari suatu instansi. Kemampuan tersebut dapat dimiliki seorang melalui pendidikan formal dan non formal. Selain kemampuan yang bersifat teknis, seorang arsiparis juga harus memiliki keampuan manajerial dan sosialkultural. Artinya seorang arsiparis juga harus memiliki kemampuan memimpin, mengkoordinasikan dan memecahkan masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan pasti akan melibatkan orang lain baik sebagai tim maupun stakeholder. Sehingga arsiparis harus memiliki kemampuan manajerial khususnya melakukan koordinasi/komunikasi sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang ingin dicapai. Kemampuan ini harus dimiliki seorang arsiparis, khususnya arsiparis tingkat ahli madya dan utama. Kemampuan sosial kultural dibutuhkan, karena seorang arsiparis harus dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat majemuk dari berbagai agama, suku dan budaya dalam melaksanakan tugasnya. Begitu banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis, sehingga dapat dibayangkan jika orang yang diangkat menjadi seorang arsiparis adalah orang sembarangan/ tidak memiliki keahlian tersebut dan tidak memiliki kemauan untuk belajar.

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin maju, tentu saja menuntut kompetensi yang semakin tinggi dari seorang arsiparis. Dahulu arsip hanya tercipta di atas kertas, kemudian berkembang lagi dalam media audio, audio-visual dan saat ini dalam bentuk elektronik/*e-records*. Perubahan-perubahan tersebut tentu memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang bertambah dari seorang arsiparis. Dan ini tidak hanya berhenti sampai disini, mungkin di masa depan akan muncul media lain yang merekam arsip/kegiatan dimana saat ini belum dapat kita bayangkan. Seorang arsiparis harus mampu dan memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan jaman/perubahan teknologi.

Munculnya *e-records* saat ini, membuat seorang arsiparis harus memiliki kompetensi untuk mengelola arsip elektronik/*e-records* mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan penyelamatannya. Apabila seorang arsiparis tidak memiliki kompetensi dalam mengelola *e-records*, bagaimana mungkin ia dapat melakukan tugasnya di masa kini dimana semua sudah serba elektronik.

Baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki visi “terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Untuk mencapai visi tersebut,



ANRI terus berupaya meningkatkan kompetensi SDM kearsipan melalui bimbingan teknis kearsipan

misi dari SPBE :

Pertama, melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Kedua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas;

Ketiga, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan handal. Keempat, membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan dikeluarkannya SPBE tersebut, artinya pemerintahan di Indonesia dituntut untuk serba menggunakan elektronik mulai dari muara sampai hilir, mulai dari menciptakan arsip sampai dengan pelayanan pada publik. Profesi arsiparis sebagai salah satu bagian

dari SDM di pemerintahan, dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan arsip elektronik, mengelola arsip dinamis dalam bentuk elektronik, memberikan layanan arsip elektronik kepada publik, akuisisi arsip elektronik, memelihara arsip elektronik dan memberikan pembinaan dari jarak jauh dengan menggunakan media elektronik. Seorang arsiparis harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Tidak dapat dipisahkan antara kearsipan dengan teknologi. Harus melihat dan mempelajari perkembangan dalam bidang kearsipan di negara lain, sehingga bisa mengimplementasikan perkembangan tersebut di Indonesia. Artinya seorang arsiparis bukan hanya harus memiliki kemampuan dasar pengelolaan arsip, tetapi juga harus siap dalam menghadapi perubahan sesuai dengan perkembangan jaman.

Arsiparis bukan jabatan fungsional “sembarangan” atau “buangan”, arsiparis menjadi tonggak negara dalam menjaga keutuhan dan keotentikan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah yang akan menjadi sejarah bangsa ini. Arsiparis merupakan pahlawan yang menjaga sejarah bangsa. Arsiparis masa kini dan masa mendatang harus memiliki kompetensi dalam berbagai bidang kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, orang yang menjadi arsiparis harus merupakan orang-orang pilihan dengan kompetensi yang baik di bidang kearsipan. Seseorang yang telah diangkat menjadi arsiparis juga harus senantiasa menambah kemampuannya dalam mengelola arsip. (SS).

Intan Lidwina

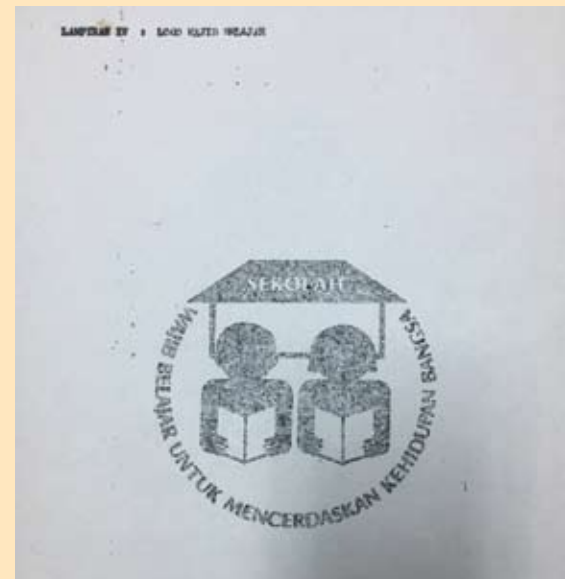
INDONESIA BEBAS BUTA HURUF SEBUAH CITA-CITA BANGSA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN

*Mari kita laksanakan wajib belajar
Putra putri tunas bangsa harapan Negara
Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa
'tuk menuju masyarakat adil sejahtera
Gunakan waktumu isilah hidupmu
Tekunlah belajar, giatlah bekerja
Berantas kebodohan, p'rangi kemiskinan
Habis gelap terbit terang, hari depan cerlang
Ayo kita giatkan wajib belajar,
Jangan putus tengah jalan, marilah tamatkan
Tanam ilmu sekarang, petik hari depan
Cerdas trampil berwibawa, penuh daya cipta
Gunakanlah waktumu isilah hidupmu
Tekunlah belajar giatlah bekerja
Jadikan tunas bangsa inti pembangunan
Adil, makmur, sejahtera, merata bahagia
Pencipta lagu: RN. Sutarmas dan H.Winarno
Gubahan dan arransemen: FX. Soetopo
(Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952)
1959-2010 No. 3887)*

Bagi sebagian besar orang Indonesia, terutama mereka yang lahir sebelum tahun 2000-an tentunya tidak asing lagi mendengar lagu ini. Ya. Lagu ini memang cukup populer di kalangan pelajar remaja pada saat itu dan juga bagi masyarakat umum. Lagu ini diperdengarkan setiap harinya melalui siaran televisi di stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI). Hal ini merupakan salah satu cara pemerintah Indonesia kala itu untuk memajukan dan merangsang masyarakatnya untuk turut serta dan mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan melalui sarana audio dan

visual berupa lagu dan juga logo Wajib Belajar. Lagu ini mulai diperdengarkan sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 009/U/1982 tentang Lagu Wajib Belajar dan Logo Wajib Belajar sebagai salah satu upaya mengenalkan program tersebut kepada masyarakat. Surat keputusan ini diterbitkan terkait usaha pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebenarnya upaya pemerintah untuk memenuhi amanat Undang-

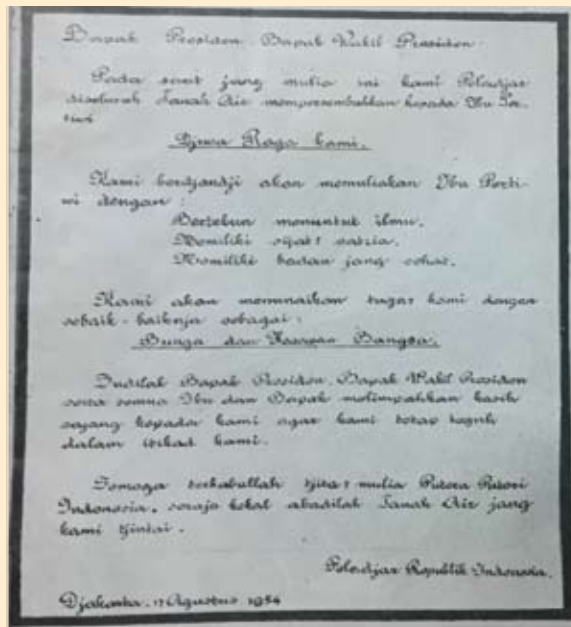


Undang Dasar 1945 terutama dalam bidang pendidikan, sudah dimulai tak lama setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, fokus pemerintah saat itu cukup banyak. Salah satunya adalah untuk menstabilkan ekonomi yang selama berabad lamanya berada di kuasai oleh VOC dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pengaruh sistem politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda mengakibatkan adanya dominasi asing atas seluruh sumber daya ekonomi Indonesia yang penting. Dan hal ini juga terus terjadi hingga beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. (Kanumoyoso, Bondan. (2001). Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.hlm 1-2)

Bisa dikatakan kurun waktu 1945-1950an merupakan tahun-tahun terberat yang harus dihadapi pemerintah yang membuat pemerintah harus membagi fokusnya ke beberapa sektor. Sektor ekonomi dan pertahanan keamanan mungkin menjadi prioritas yang utama pada saat itu, terutama di masa itu perekonomian Indonesia masih belum stabil sehingga pendidikan tampaknya tidak terlalu menjadi fokus pemerintah. Kala itu, sektor-sektor modern ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Hal ini yang kemudian menimbulkan pendapat yang mendesak pemerintah Indonesia untuk secara bertahap mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan Belanda dan sekaligus mendorong munculnya pengusaha-pengusaha pribumi Indonesia. (Kanumoyoso, Bondan. (2001). Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.hlm 36)

Masih bercokolnya modal asing yang kuat menguasai perekonomian Indonesia pada tahun-tahun awal setelah penyerahan kedaulatan, menjadi sangat pelik dan dilematis bagi pemerintah Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing tersebut masih tetap beroperasi karena Indonesia terikat komitmen yang tercantum dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Seperti telah disinggung sebelumnya isi KMB mewajibkan pemerintah Indonesia untuk menghormati legalitas keberadaan perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan-perusahaan Belanda (Kanumoyoso, 2001:12-37). Hingga dilakukannya pelaksanaan nasionalisasi yang dilakukan secara resmi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dengan diberlakukannya Undang-Undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Hal ini mengakhiri peran istimewa Belanda dalam perekonomian Indonesia.

Walaupun mungkin belum menjadi fokus utama tetapi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan



(Daftar Arsip Sekretariat Negara: Pidato Presiden RI Soekarno 1958-1967 No. 001)

dunia pendidikan. Lima tahun setelah Indonesia menyatakan diri merdeka dari penjajahan bangsa asing, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Pada Undang-Undang tersebut, pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih dan di Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sedangkan pada Bab VII tentang Kewajiban Belajar pada pasal 10 dikatakan: (1) semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur delapan (8) tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya; (2) belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar; (3) kewajiban belajar itu diatur dalam Undang-

Undang yang tersendiri. Pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dasar-dasar pendidikan di sini adalah dasar pendidikan dan pengajaran yang sama sekali berbeda dengan pada jaman Belanda. Hal ini dikarenakan pendidikan/pengajaran pada masa kolonial Belanda umumnya tidak mengakar kepada masyarakat Indonesia, tidak mengacu kepada nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan yang sangat jelas terlihat adalah sekolah-sekolah di masa kolonial Belanda hanya menerima sebagian kecil rakyat Indonesia. Rakyat jelata (bangsa Indonesia) pada umumnya tidak mendapatkan kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah. (http://simpuh.kemendiknas.go.id/regulasi/uu_04_50.pdf)

Setahun setelah itu, di sebuah kawasan di Jakarta dilakukan kegiatan belajar mengajar membaca dan menulis yang dilakukan oleh tentara dan pemuda demokrat Jakarta dalam upaya pemberantasan buta huruf. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 91 DVD-RK/2010 (Track 3)) Selain itu, di lain tempat dan waktu dilakukan juga kegiatan

belajar mengajar baca tulis dengan menggunakan sistem Laubach yang dilakukan oleh Dr. Laubach dengan menuliskan aksara beserta contohnya di papan tulis yang kemudian huruf tersebut disusun secara berdampingan dengan gambar yang berkaitan. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 135 DVD-RK/2010 (Track 1)) Hal ini menunjukkan peran serta elemen masyarakat dan juga ABRI serta para pemuda pada saat itu untuk turut serta menyukseskan kegiatan pemberantasan buta huruf yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Selain ABRI dan para pemuda, para wanita pun turut aktif dalam menyukseskan pemberantasan buta huruf dan mengikuti kursus-kursus lain. Kursus-kursus yang dimaksud tidak terbatas pada kursus menjahit, memasak dan lainnya yang dahulu sangat identik dengan sekolah khusus wanita. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 78 DVD-RK/2010 (Track 7))

Sebagai sebuah negara yang pernah mengalami kolonialisme, tentunya masih banyak yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk terus memperjuangkan dan menggapai cita-cita bangsa dan untuk itu dibutuhkan peran serta dari semua kalangan tak terkecuali para pelajar. Pada tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Sukarno dalam pidatonya di Istana Negara di hadapan para pelajar Indonesia kembali menyampaikan amanatnya kepada para pelajar sebagai angkatan pelaksana cita-cita kemerdekaan. Beliau meminta agar para pelajar untuk bekerja dan belajar dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Para pelajar diharuskan mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup dan juga kemauan, serta tekad dan semangat yang tinggi untuk dapat mengabdikan diri pada tanah air dan bangsa. Tak lupa Presiden Sukarno juga menyampaikan pesan kepada para pelajar agar dapat memupuk dan memelihara jiwa agar menjadi jiwa yang besar karena cita-cita yang besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hanya dapat diwujudkan oleh mereka

yang berjiwa besar. Pada kesempatan itu para pelajar pun menyampaikan janjinya kepada Presiden Sukarno seperti yang tercantum pada gambar:

Periode 1957-1959 menjadi saat paling menentukan dalam percaturan politik; pada periode ini tatanan Demokrasi Parlementer dibongkar dan dibawa menuju periode Demokrasi Terpimpin. Perkembangan tersebut juga erat terkait dengan meningkatnya ketegangan antara daerah dan pusat; hubungan yang memburuk pada tahun-tahun tersebut telah mengarah pada perlawanan terbuka di Sumatera dan Sulawesi, dalam bentuk pemberontakan PRRI dan Permesta (Kanumoyoso, 2001:96-97). Pada periode tersebut dapat dikatakan menjadi saat-saat yang juga menjadi tidak menentu bagi Indonesia dan membuat suasana menjadi tidak kondusif.

Namun, sepertinya ketidakstabilan situasi politik tidak terlalu mempengaruhi program pemberantasan buta huruf yang sudah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari prestasi yang ditorehkan oleh Kabupaten Banyumas yang menyatakan diri bebas dari buta huruf di tahun 1961. Adapun kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memberantas buta huruf diantaranya adalah anak-anak mencari pelepah bambu yang sudah tua untuk kemudian dijadikan alat untuk menulis dan hasil tulisan tersebut dijadikan bahan bacaan bagi anak-anak. Di beberapa tempat mereka juga melakukan semacam ujian mendadak dengan cara mencegat para penduduk yang sedang berlalu lalang dan meminta mereka untuk melakukan ujian baca dan tulis. Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan ijazah kursus membaca dan memberikan hadiah kepada mereka yang mendapatkan ijazah. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 473 DVD-RK/2010 (Track 1))

Selang setahun kemudian, pada pidatonya di Hari Proklamasi Bebas Buta Huruf Jakarta Raya digabungkan

dengan Hari Sosial dan Hari Ibu di Istana Olahraga 'Bung Karno' Senayan, Jakarta, pada tanggal 27 Desember 1962, Presiden Sukarno mengatakan bahwa tahun 1950-1955 merupakan 'the period of survival' bagi bangsa Indonesia. Periode di mana bangsa Indonesia bisa bertahan dari segala macam serangan terutama bangsa Belanda untuk merebut kembali Indonesia tetapi dapat digagalkan. Bangsa Indonesia tetap bertahan dan tidak hancur lebur. Lebih lanjut pada pidatonya di hari itu, beliau mengapresiasi pencapaian yang luar biasa di bidang pendidikan. Jikalau pada tanggal 17 Agustus 1945 dikatakan bahwa jumlah murid Sekolah Rakyat di Hindia-Belanda hanya $\frac{3}{4}$ juta dan sekarang (red: pada saat pidato dilaksanakan) menjadi 12 juta. Dengan kata lain jika pada tanggal 17 Agustus 1945 jumlah murid sekolah menengah pada waktu itu sekitar 75.000 orang, maka saat dilaksanakan pidato tersebut sudah bertambah menjadi satu juta orang. Beliau menambahkan bahwa kala dirinya menjadi mahasiswa di Bandung, hanya ada sebelas orang mahasiswa Indonesia (termasuk Presiden Sukarno) dan pada tahun 1962 (red: saat pidato dilaksanakan) telah bertambah menjadi 120.000 mahasiswa dan mahasiswi. Dalam pidatonya beliau juga menganjurkan agar para ibu di Jakarta terus membantu pemerintah dalam memberantas buta huruf sehingga nanti tidak hanya mereka yang berusia 13 hingga 45 tahun yang bebas buta huruf tetapi juga mulai dari anak usia 6 tahun hingga mereka wafat nanti mereka tidak lagi buta huruf sehingga nanti bangsa Indonesia dapat mengatakan kepada dunia bahwa (pemberantasan buta huruf): "That is one of our greatest achievements". Perlu diketahui juga bahwa di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1962, Kotapraja Bogor menyatakan diri bebas dari buta huruf. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 638 DVD-RK/2013 (Track 1))

Jika pada tahun 1962, Jakarta dinyatakan bebas buta huruf (Pidato

Presiden Sukarno pada tanggal 27 Desember 1962 pada Hari Proklamasi Bebas Buta Huruf Jakarta Raya digabungkan dengan Hari Sosial dan Hari Ibu di Istana Olahraga 'Bung Karno' Senayan, Jakarta) maka pada tanggal 31 Desember 1964 atau dua tahun setelahnya, Indonesia dinyatakan bebas buta huruf. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya pameran Indonesia Bebas Buta Huruf yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Hartati Mardjuki Soedibyo dan membacakan piagam Indonesia Bebas Buta Huruf yang dilanjutkan dengan pembacaan pidato oleh Presiden Sukarno. (Daftar Arsip PPFN Gelora Indonesia Nomor DVD: 137 DVD-RK/2010 (Track 4)) Presiden Sukarno dalam pidatonya menyampaikan rasa bangga dan syukurnya bahwa Indonesia sudah bebas dari buta huruf. Itu artinya seluruh rakyat Indonesia dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa berusia 45 tahun sudah bisa membaca dan menulis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara urutan kedua di Asia yang 'melek huruf' setelah Jepang. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi sebuah negara yang baru menjelang dua dekade membebaskan diri dari kolonialisme.

Setelah Indonesia dinyatakan bebas buta huruf, di tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional disebutkan bahwa Pendidikan Nasional merupakan unsur mutlak dalam *Nation* dan *Character Building*. Adapun tugas Majelis Pendidikan Nasional ialah mengadakan penelitian, pembinaan, pengamanan dan pengawasan Sistem Pendidikan Nasional Pancasila di segala bidang Pendidikan. Sedangkan wewenang dari Majelis Pendidikan Nasional adalah menentukan kebijaksanaan (policy) mengenai pendidikan di segala bidang. Kedudukan Majelis Pendidikan Nasional sebagai Badan Tertinggi dalam bidang pendidikan nasional merupakan lembaga negara tertinggi yang langsung berada di

bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Keanggotaan Majelis Pendidikan Nasional terdiri dari :

a. Menko/Menteri yang mempunyai hubungan dengan Pendidikan dan Wakil Komisi Pendidikan DPR-GR;

b. Partai politik, yaitu wakil-wakil semua partai politik yang sah;

c. Golongan fungsional, yaitu wakil-wakil dari tani, buruh, pegawai, pengusaha nasional, angkatan bersenjata, alim Ulama, angkatan '45, cendekiawan, guru/pendidikan, budayawan/seniman, wartawan, pemuda, mahasiswa, Pramuka. Perwakilan daerah, yaitu wakil-wakil dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat. (http://bpa.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/PERPRES_1965_014.pdf)

Anggota Majelis Pendidikan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Pengayom Agung Majelis Pendidikan Nasional atas usul Ketua Majelis Pendidikan Nasional.

Sedangkan personalia Majelis Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengayom Agung: Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi: Dr.Ir.H. Sukarno;

Kedua, Ketua /merangkap Anggota: Prof.Dr. Soejono Hadinoto, S.H./Menteri Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia;

Keanggotaan para Wakil Ketua, anggota-anggota dan Sekretaris Umum Majelis Pendidikan Nasional akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Kurang lebih dua dekade setelah itu, gaung program pemerintah mengenai pendidikan tidak lagi terdengar. Baru pada tanggal 2 Mei 1984, bertepatan

dengan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto mencanangkan Gerakan Wajib Belajar yang bertempat di Stadion Utama Senayan. Di sela-sela pidatonya beliau mengatakan bahwa setelah 39 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia baru mencanangkan gerakan Wajib Belajar. Hal itu bukan berarti mengabaikan pendidikan. Hanya saja di saat itulah Indonesia dirasa telah siap untuk memulai gerakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengingat telah dilaksanakannya tiga kali Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan dirasa cukup sukses sehingga jelang dimulainya Repelita IV pemerintah baru merasa siap untuk melakukan Gerakan Wajib Belajar. Harapannya dengan Gerakan Wajib Belajar ini seluruh anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun dapat memperoleh kesempatan yang sama dan adil untuk menikmati pendidikan dasar yang merata di seluruh wilayah tanah air. (Daftar Arsip Sekretariat Negara: Pidato Presiden Soeharto 1966-1998 (Jilid II No. 761-1389) No. 1002.2)

Dalam kaitannya dengan program Gerakan Wajib Belajar, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tanggal 23 Juli 1984 menetapkan sebuah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 039/P/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak Bertempat Tinggal Terpencil dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 5250) Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak pilih-pilih dalam usahanya melaksanakan amanat UUD 1945. Peraturan ini memperlihatkan perhatian mereka terhadap semua anak bangsa dan dirasa harus ada peraturan khusus untuk melaksanakan kegiatan Wajib Belajar bagi anak-anak kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan juga bagi anak-anak yang tinggal di tempat terpencil.

Dalam menyukseskan program pemerintah di bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 13 undang-undang tersebut dikatakan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Adapun syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang dalam hal ini dapat ditemukan di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Sedangkan pasal 14 menyebutkan bahwa warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar dan warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Pada pasal 39 undang-undang yang sama menjelaskan mengenai isi kurikulum yang merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Turut dijelaskan pula isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang wajib memuat: pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan untuk pendidikan dasar wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran mengenai : pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, membaca dan menulis, Matematika (termasuk berhitung), pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani

dan kesehatan, menggambar; serta Bahasa Inggris. (<http://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/591.pdf>)

Setelah mengeluarkan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional, setahun setelahnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Sedangkan pada pasal 3 pada peraturan pemerintah yang sama dikatakan bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. (http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_28_90.pdf)

Jika tahun 1950-an awal fokus pendidikan untuk rakyat Indonesia adalah untuk memberantas buta huruf/ buta aksara dengan kewajiban rakyat Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar setidaknya enam tahun maka pada tahun 1994, Presiden Republik Indonesia kala itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Hal ini mempertimbangkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dirasa perlu untuk segera dilaksanakan sebagai kelanjutan wajib belajar enam tahun yang telah dilaksanakan. (Daftar Arsip Statis Sekretariat Negara RI: Seri Produk Hukum tahun 1949-2005 No. 12825A)

Presiden Soeharto dalam Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, mengintruksikan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun di seluruh Indonesia sebagai suatu gerakan nasional terhitung mulai tahun pelajaran 1994/1995 dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan melaporkan pelaksanaan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar secara periodic kepada Presiden Republik Indonesia. Pada lampiran instruksi presiden ini dimuat Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang terdiri dari sepuluh (10) poin. Beberapa diantaranya menjelaskan bahwa wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat; wajib belajar pendidikan dasar diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar; dan wajib belajar pendidikan dasar diarahkan agar diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun untuk Sekolah Dasar dan yang sederajat dan/atau setara dan berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan yang sederajat dan/atau setara. (http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_28_90.pdf)

Pada tahun yang sama, untuk memudahkan pelaksanaan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengeluarkan keputusan bersama Nomor: 0319/U/1994; Nomor: 137A

Tahun 1994; Nomor: 516 Tahun 1994; dan Nomor: KEP/14/XII/1994 tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Melalui Operasi Bhakti ABRI Manunggal Aksara. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan sebagai berikut:

Pertama, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara adalah upaya khusus untuk membelajarkan masyarakat yang masih buta Aksara Latin, buta Bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar secara menyeluruh dan bersifat nasional dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas sehingga pada akhir Pelita VI warga masyarakat usia 10-44 tahun sudah bebas dari buta aksara.

Kedua, program-program Departemen Dalam Negeri termasuk program-program LKMD dan PKK adalah kegiatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dapat diintegrasikan dalam Operasi Bhakti ABRI Manunggal Aksara di semua tingkatan Pemerintahan.

Ketiga, Program-program Departemen Agama mencakup seluruh bidang kegiatan pembinaan mental spiritual dan penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan di lingkungan Departemen Agama yang dapat diintegrasikan melalui sarana pendidikan keagamaan dan tempat-tempat ibadah yang dalam pelaksanaannya mendayagunakan pemuka agama dan guru madrasah untuk memberikan motivasi dan pengajaran.

Keempat, Bhakti ABRI adalah salah satu metoda Pembinaan Teritorial (Binter) yang merupakan pelibatan ABRI sebagai alat Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dalam menjalankan fungsi sosial untuk menunjang pelaksanaan program pemerintah tanpa mengabaikan kewaspadaan dan kesiapan Hankam.

Kelima, Operasi Bhakti ABRI adalah pelibatan ABRI sebagai alat Hankam dalam rangka pembinaan wilayah, bertitik berat fisik materiil dan dilakukan atas perintah Menteri

Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI dengan memanfaatkan sarana, dana, daya, dan tenaga manusia dalam rangka Bhakti ABRI.

Keenam, Operasi Bhakti ABRI tipe A adalah Operasi Bhakti tipe kerja sama antara ABRI sebagai penyedia tenaga dengan pihak lain sebagai penyedia dana dan sarana.

Ketujuh, Manunggal Aksara adalah sebutan khusus Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara yang penyelenggaraannya dilakukan pihak-pihak yang mengadakan kerja sama secara terpadu dalam bentuk Operasi Bhakti ABRI. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8977).

Pada tahun berikutnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor: 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan pada ayat 2 dikatakan bahwa pelaksanaan teknis wajib belajar menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8764)

Dapat dikatakan Gerakan Wajib Belajar yang menjadi program pemerintah cukup sukses. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091/U/1998 Tanggal 1 Mei 1998 yang menetapkan kotamadya dan kabupaten di Indonesia yang dikatakan berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Adapun ke sembilan kotamadya/kabupaten tersebut adalah: Kotamadya Kupang (Nusa Tenggara Timur); Kotamadya Tegal (Jawa Tengah); Kotamadya Jakarta Selatan (DKI Jakarta); Kabupaten Kulon

Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Magetan (Jawa Timur); Kabupaten Karo (Sumatera Utara); Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan); Kabupaten Lampung Tengah (Lampung); dan Kabupaten Tangerang (Jawa Barat). (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8796)

Setelah sukses di tahun 1998, pada tahun 2003, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/P/2003 tanggal 1 Mei 2003 yang isinya mengenai penetapan kabupaten/kota yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang diberi penghargaan Widyakrama sebanyak tiga puluh (30) kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8846)

Dalam rangka untuk melakukan percepatan penuntasan program wajib belajar, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). (Inventaris Arsip Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (1952) 1959-2010 No. 8858) Tujuan dari GNP-PWB/PBA adalah:

1. Mempercepat perluasan akses anak usia 7-12 tahun di SD/MI/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajib Diknas 9 tahun pada akhir tahun 2008;
2. Mempercepat perluasan akses anak usia 13-15 tahun di SMP/MTs/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajib Diknas 9 tahun pada akhir tahun 2008;
3. Mempercepat peningkatan

angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas melalui pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas (data BPS 2004, sebanyak 15.414.311 orang atau 10,21%) menjadi 5% pada akhir tahun 2009.

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GNP-PWB) adalah:

1. Anak usia 7-12 tahun yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara;

2. Anak yang telah lulus SD/MI/pendidikan yang setara, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP/MTs/pendidikan yang setara.

Target GNP-PWB adalah:

1. Meningkatnya presentase peserta didik SD/MI/pendidikan yang setara yang berusia 7-12 tahun terhadap penduduk usia 7-12 tahun (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008;

2. Meningkatnya persentase peserta didik SMP/MTs/pendidikan yang setara terhadap penduduk usia 13-15 tahun (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008;

3. Menurunnya angka putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1% dan SMP/MTs/pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1%;

4. Meningkatnya kualitas lulusan dengan indikator 60% peserta Ujian Sekolah SD mencapai nilai di atas 6.00, 70% peserta Ujian Nasional SMP mencapai nilai di atas 6.00;

5. Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan sehingga 75% SD/MI dan 75% SMP/MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

6. Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan menjadi 30% untuk SD/MI/pendidikan yang sederajat, dan 80% untuk SMP/MTs/pendidikan yang sederajat;

7. Meningkatnya jumlah gedung SD/MI/pendidikan yang sederajat menjadi 100% dalam kondisi baik, dan SM/MTs/pendidikan yang sederajat menjadi 99% dalam kondisi baik;

8. Terbentuknya dan berfungsinya jaringan sistem informasi pendidikan dengan baik antar pusat-provinsi-kabupaten/kota;

9. Empat puluh persen (40%) SD/MI dan tujuh puluh persen (70%) SMP/MTs menjalankan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan baik;

10. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PBA) adalah:

1. Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas penduduk buta aksara usia 15-44 tahun;

2. Penduduk buta aksara parsial atau penduduk yang hanya bisa membaca dan menulis selain huruf latin.

Target GNP-PBA adalah:

1. Sampai dengan tahun 2009, target nasional penduduk buta aksara adalah sebanyak 7,7 juta orang yang terdiri atas:

a) Target pemberantasan penduduk buta aksara yang telah dimelekkaksarakan pada tahun 2005 sebanyak 800 ribu orang;

b) Target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15-44 tahun dari tahun 2006-2009 sebanyak 3,6 juta orang;

c) Target pemberantasan

penduduk buta aksara usia 45 tahun ke atas sebanyak 3,3 juta orang.

2. Pada tingkat provinsi, target pemberantasan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas diprioritaskan pada sembilan (9) yang memiliki penduduk buta aksara tertinggi.

3. Pada tingkat kabupaten/kota, target pemberantasan penduduk buta aksara adalah:

a) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas kurang dari 5%, ditargetkan agar tuntas pada akhir tahun 2007.

b) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas antara 5-10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir tahun 2008.

c) Bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas di atas 10%, ditargetkan agar tuntas pada akhir tahun 2009.

Kiranya program percepatan penuntasan gerakan wajib belajar masih terus dilakukan hingga saat ini dan masih akan dilakukan lagi di kedepannya. Tentunya suksesnya gerakan wajib belajar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Perjuangan ini belum berakhir dan akan terus ada. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Sukarno di salah satu pidatonya: "*For a revolutionary nation there is no journey's end. For a fighting nation there is no journey's end.*" (Daftar Arsip Sekretariat Negara: Pidato Presiden RI Soekarno 1958-1967 No. 448)

Beny Oktavianto & Nurarta Situmorang

TRANSMIGRASI (KOLONISASI) PERTAMA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA

Latar Belakang Kolonisasi

Setelah ratusan tahun keberadaan Belanda di Indonesia—dimulai dari berdirinya organisasi dagang VOC (1602-1789) dan berdirinya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1789-1943) beragam pendapat dan pandangan dari orang-orang Belanda sendiri terhadap anak negeri yang sedang mereka duduki. Pandangan positif dari orang-orang Belanda yang peduli karena mereka merasa sudah ratusan tahun menikmati hasil kekayaan bumi Nusantara. Sehingga sejak akhir abad 19 menjelang abad 20 muncullah pendapat-pendapat dan gagasan dari mereka yang peduli dan ditambah dengan genjarnya pemberitaan koran saat itu tentang kehidupan anak-anak jajahan di bumi Nusantara melalui pers yang ada di masa itu. Hingga lahirlah istilah yang mereka sebut dengan politik etis atau politik balas budi.

Munculnya kelompok pemikir yang disebut juga sebagai kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (seorang wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (seorang politikus) membuka mata pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pribumi yang terbelakang. Sehingga kemunculan para kaum etis ini melahirkan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik etis memiliki makna suatu pemikiran yang menyatakan

bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan anak-anak jajahan. Dan kelompok pemikir ini menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk memikirkan nasib anak-anak jajahannya. Karena kelompok ini telah melihat begitu banyaknya sumbangan wilayah jajahan bagi kemakmuran negeri mereka. Kesadaran ini memunculkan kelompok-kelompok pemikir yang mau membantu anak jajahan. Sebenarnya banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran

dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis.

Tulisan-tulisan ini akhirnya juga menggugah hati penguasa dimasa itu yang bermula pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda secara moral merasa terpenggil dan berhutang budi terhadap bangsa



Saran dan pertimbangan tanggal 29 Januari 1904 atas penyelidikan tanggal 16 Januari 1904 No.254 mengenai "Schema Perencanaan Emigrasi dari Jawa dengan suatu Penaksiran"
Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie seri Grote Bundel Besluit No. 1677*



Peta Distrik Lampung, saat itu Gedog Tataan termasuk dalam *Onderafdeeling* Teluk Betung, Tahun 1927
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia 1437

pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi; Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian, Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi dan edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Imigrasi atau kolonisasi yang merupakan pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih jarang penduduknya, seperti dari pulau Jawa ke pulau Sumatera perlu dilakukan karena kepadatan penduduk di pulau Jawa yang pada akhirnya meresahkan pemerintah Hindia Belanda yang menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan kejahatan. Imigrasi yang pada awalnya hanya untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah jarang penduduk oleh perkebunan diambilkesempatan dengan melakukan transmigrasi penduduk dari Jawa untuk dijadikan pekerja atau buruh di tanah-tanah perkebunan yang baru mereka buka. Sebagaimana Karl Z Pelzer dalam bukunya "Koeli Kontrak" bahwa pengiriman penduduk dari daerah Jawa ke Sumatera khususnya Sumatera Utara untuk dijadikan buruh atau koeli kontrak.

Salah satu yang menjadi tujuan kolonisasi pada awal abad 20 tepatnya tahun 1905 adalah Gedong Tataan dan salah satu desanya bernama desa Bagelen yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan bukti-bukti sejarah yang ada di desa ini.

Kabupaten Pasawaran Kecamatan Gedong Tataan desa Bagelen merupakan daerah kolonisasi pertama yang dipilih oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Sebagai daerah pertama yang mendapat kolonisasi menjadi suatu sorotan atau kajian untuk menuliskan sejarah kolonisasi daerah ini. Apa, kenapa dan bagaimana Gedong Tataan menjadi



Lembaran ensiklopedi Belanda yang menjelaskan tentang daerah administratif Gedong Tataan.
Sumber: *Encyclopaedi van Nederlandsch Indie*, Tweede Druk, H - M, s' Gravenhage, halaman 509-522



Peta Distrik, skala 1: 100.000, Lampiran B dari proses verbal permohonan erfpacht atas sebidang tanah, tanggal 4 Januari 1926, dimana di dalamnya terdapat atau tertulis nama 2 daerah yaitu Bagelen dan Gedong Tataan.
Sumber: ANRI, *Binnenland Bestuur Grote Bundel* nomor: 115

daerah pertama pengiriman penduduk dari Jawa akan kita coba telusuri melalui arsip.

Desa Bagelen-Gedongtataan Afdeeling Telokbetong Awal Koloni Baru

Letak geografis Desa Bagelen-kecamatan Gedong Tataan kira-kira 25 km di sebelah barat Tanjungkarang menuju ke Kota Agung. Secara administratif wilayah ini pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda masuk ke dalam Onderafdeeling Telokbetong-afdeeling Lampung yang merupakan bagian dari karesidenan Sumatera dengan posisi sebagaimana yang terdapat dalam peta pada masa kolonial.

Hasil temuan dan laporan H.G. Heyting dari tugas yang diberikan pemerintah Hindia Belanda tentang kemungkinan pemindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera segera ditindak lanjuti. Desa inti pertama dibangun pada tahun 1905 di desa Bagelen-Gedong tataan kira-kira 25 km di sebelah barat Tanjungkarang di pinggir jalan ke Kota Agung. Pembangunan desa ini ditangani langsung oleh H.G Heyting. Heyting membangun desa itu menurut pola dari Jawa. Segala sesuatunya di desa ini diatur

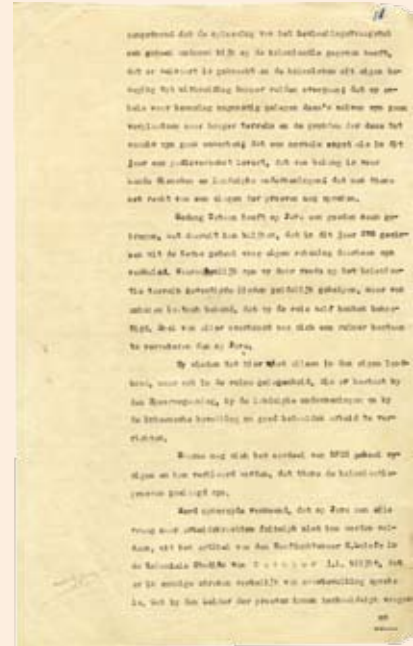
seperti di Jawa, termasuk struktur pemerintahannya, dengan kamituo, lurah dan asisten wedana. Bahkan nama tempat tinggal yang baru ini pun tetap dinamakan dengan nama asal daerah para koloni sebagai contoh gedong tataan desa bagelen ini adalah nama desa di Kedoe dimana mereka tinggal sebelumnya.

Penamaan tempat tinggal serta sistem atau struktur pemerintahan yang sama ditempat ini oleh Heyting agar secara psikologis para kolonistasi ini tetap merasa nyaman dan betah ditempat yang baru. Meskipun sangat berlainan dengan struktur pemerintahan masyarakat setempat yang merupakan masyarakat adat. Sistem pertaniannya pun berbeda. Sehingga daerah kolonisasi itu merupakan *enclave* sosial dan politik.

Dalam periode ini para kolonisasi dibantu secukupnya. Sebagai jaminan, setiap kepala keluarga diberi premi 20 guldens, dan diperlengkapi dengan alat-alat masak juga alat-alat pertanian. Di tempat baru ini mereka mendapat tempat tinggal dibantu dengan perumahan dan bahan makan selama 2 tahun. Menurut Anggaran Pemerintah, biayanya per kepala keluarga adalah 300 guldens, tidak



Para kolonis menerima pembagian kebutuhan pertanian, Lampung, 1930
 Sumber : ANRI, KIT No. 315-14 (atas), KIT no. 314-32 (bawah)



Surat dari Pemerintah Daerah Karesidenan-Distrik Lampung kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda bekerja sama dengan Direktur Pemerintah Dalam Negeri (*Directeur van Binnenlands Bestuur*), tanggal 23 November 1918, nomor 8030/4 tentang pengiriman kolonis ke Gedong Tataan
 Sumber : *Algemene Secretarie Grote Bundel Besluit* No. 2187

termasuk biaya pembangun jalan dan irigasi.

Perintisan daerah baru oleh orang-orang Jawa yang digerakkan oleh pemerintah Hindia-Belanda, pertama kali dimulai di desa Bagelen-Gedong Tataan pada tahun 1905, yang terletak dikaki Gunung Betung,



Perkampungan kolonisasi pertama, Lampung (1930)
 Sumber: ANRI, KIT No. 315-12

20 km disebelah barat Tangjungkarang menuju Kota Agung. Dan pengiriman ini baru berakhir pada tahun 1928. Selama masa ini desa-desa Jawa itu dibangun “enclave kolonisasi” yang dipersiapkan khusus untuk orang-orang Jawa dengan sistem pemerintahan sendiri. Baru sesudah marga di Lampung diakui resmi sebagai “*inlandse gemeente*”(1928), kolonisasi-kolonisasi baru orang Jawa di bagian daerah Gedong Tataan tersebut juga ditempatkan di wilayah marga dan dibawahkan kepada marga.

Kampung-kampung yang terpisah ataupun yang dibawah marga, pertumbuhan kolonisasi itu telah menghasilkan “segumpal tanah Jawa”

dengan persawahan dan sekelompok masyarakat Jawa. Dimulai di Gedong Tataan dominasi dan pengaruh Jawa ini sampai ke arah barat ke daerah sekitar Pagelaran dan ke selatan mereka mengisi daerah pinggiran Rawa Kementara.

Sebagaimana arsip *algemene secretarie* yang melaporkan tentang pengiriman kolonisasi berikutnya ke daerah desa Bagelen Gedong Tataan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan surat dari Pemerintah Daerah Keresidenan Sumatera-afdeeling Lampung kepada Gubernur

Jenderal Hindia Belanda bekerja sama dengan Direktur Pemerintah Dalam Negeri (*Directeur van Binnenlands Bestuur*), tanggal 23 November 1918 no. 8030/4, Gedong Tataan yang merupakan nama pemberian dari Jawa dimana pada tahun ini sebanyak 278 keluarga yang berasal dari desa Bagelen karesidenan Kedoe dipindahkan ke daerah ini.

Desa Bagelen yang saat ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Pasawaran Lampung telah menjadi bukti sejarah keberadaan transmigrasi pertama di bumi pertiwi. Hingga saat ini masih dapat kita lihat rumah-rumah penduduk dan juga peralatan pertanian di masa lalu saat transmigrasi pertama membuka hutan di daerah Bagelen Lampung.

TIM PRESERVASI ANRI

PENYELAMATAN ARSIP BENCANA DI SULAWESI TENGAH

ANRI Turunkan Tim Penanganan Arsip Pascabencana di Palu

Pagi pukul 05.00 WIB (8/10) Tim penyelamatan dan perlindungan arsip yang juga disebut sebagai tim Task Force telah bertolak ke Palu, Sulawesi Tengah. Keberangkatan tim ini langsung yang dipimpin oleh Direktur Preservasi, Kandar untuk membantu penanganan arsip pascabencana di wilayah Palu dan Donggala. Dalam misi ini, tim Task Force ANRI bertugas di antaranya melakukan penyelamatan arsip negara pascabencana gempa bumi dan tsunami, termasuk penyelamatan arsip bernilai guna sejarah milik masyarakat Palu dan Donggala, serta membantu perbaikan arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan masyarakat.

Tanggap darurat penanganan arsip pasca bencana ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di mana dijelaskan pada Pasal 6 huruf g bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya meliputi pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Hal ini pun dipertegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang intinya mengamanatkan negara untuk menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana.

Tim Task Force ANRI sangat berterimakasih apabila ada masyarakat Palu dan Donggala yang berkenan secara sukarela membantu dan bergabung dengan Tim Task Force ANRI. Mohon doa juga dari Sahabat ARSIP, semoga Tim Task Force ANRI diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam bertugas dan

senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Tim Task Force ANRI Mulai Survei Lokasi Terdampak Bencana

Palu (8/10)-Setiba di Palu, tim Task Force langsung menyerahkan bantuan dari ANRI secara simbolis. Adapun bantuan yang diserahkan antara lain berupa makanan, obat-obatan dan masker satu kali pakai. Usai memberikan bantuan, Tim Task Force ANRI bergerak menyurvei lokasi yang terkena dampak bencana. Adapun lokasi yang telah disurvei pada hari pertama ini di antaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, TVRI, Kantor Samsat Bersama, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Survei ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi arsip yang terdampak bencana.



Tim Task Force ANRI sedang mengidentifikasi kerusakan arsip akibat bencana gempa dan tsunami

Kegiatan penanganan arsip pascabencana ini merupakan sikap responsif ANRI dalam membantu penyelamatan arsip pascabencana. Tim Task Force ANRI Lanjutkan Identifikasi Arsip Terdampak Bencana di Palu

Palu (9/10) – Meski merasakan beberapa kali gempa susulan, Tim Task Force ANRI terus melanjutkan survei dan koordinasi dengan instansi terkait pada hari kedua penugasan ini. Tim yang dipimpin Direktur Preservasi, Kandar mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berlokasi tak jauh dari pantai dan turut terkena dampak tsunami.

Kandar menyatakan bahwa kedatangan Tim Task Force ANRI ke Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng bertujuan untuk melakukan pendataan terhadap arsip yang rusak akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya

(28/9). “Berdasarkan pendataan arsip yang rusak tersebut, nantinya tim dapat mengidentifikasi sejauh mana kategori kerusakan arsipnya. Apakah masuk pada kategori rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat,” jelas Kandar. Ditambahkan oleh Kandar, ANRI juga nantinya akan menyampaikan rekomendasi permasalahan dan penanganan arsip yang terdampak bencana tersebut.

Hasil survei dan identifikasi Tim Task Force ke beberapa kantor pemerintahan selama dua hari ini nantinya disusun dalam laporan yang komprehensif dan akan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Di samping melakukan survei dan identifikasi, Tim Task Force ANRI juga akan memberikan edukasi dan pemahaman melalui kegiatan Bimbingan Teknis kepada pengelola arsip di organisasi perangkat daerah wilayah Sulteng dan sekitarnya,

terutama bagi sumber daya manusia kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng. Bimbingan teknis tersebut akan dilaksanakan pada 10 Oktober 2018. Ini menjadi hal yang menjadi perhatian karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng akan turut menjadi penggerak dalam perlindungan dan penyelamatan arsip pascabencana di Provinsi Sulteng.

Penyelamatan dan Pelindungan Arsip Bernilai Sejarah dan Vital di Sulawesi Tengah

Pada hari ketiga Tim Task Force ANRI melakukan penyelamatan dan pelindungan arsip bernilai sejarah dan vital di Sulawesi Tengah.

Langkah awal, Tim melaksanakan pertemuan dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, Direktur Preservasi, Kandar menyampaikan beberapa hal yg diamanatkan undang-undang dan



Tim Task Force langsung menyerahkan bantuan dari ANRI secara simbolis. Adapun bantuan yang diserahkan antara lain berupa makanan, obat-obatan dan masker

pentingnya koordinasi antar berbagai lembaga daerah terutama pada dinas kearsipan untuk menjadi motor atau penggerak untuk melindungi dan mengamankan seluruh arsip aset dari dampak bencana yang di Sulawesi tengah.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berterima kasih dan mendukung tim ANRI untuk melakukan penyelamatan arsip yang terkena bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Setelah tim ANRI memberikan informasi awal kebijakan-kebijakan tentang penyelamatan arsip dari dampak bencana, kemudian tim dari ANRI dibagi menjadi dua. Tim pertama, melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh pelaksana

dan arsiparis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Tim berikutnya bergerak untuk melakukan pendataan.

Pendataan pertama di kantor Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dimana kantor ini sangat memprihatinkan karena disamping bau yang sangat menyengat kemungkinan masih ada jenazah yang ada di sana sehingga tim ANRI belum dapat masuk.

Tim ANRI menduga terdapat sejumlah arsip bernilai sejarah itu masih tertimbun puing-puing bangunan, sehingga perlu ada tindakan lebih cepat lagi, agar bisa dievakuasi di tempat yang lebih aman.

Selanjutnya Tim ANRI menuju ke IAIN. Tim melihat kondisi gedung kampus yang rusak, dikhawatirkan ada arsip kemahasiswaan yang hilang.

Tim memutuskan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tim Task Force ANRI berharap agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mendata seluruh arsip yang rusak di organisasi perangkat daerah, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan bersama oleh Tim Task Force ANRI.

ANRI Harap Dispersip Sulteng Lanjutkan Penyelamatan Arsip

Palu (11/10) – Sebelum mengakhiri penugasan di Sulawesi



Tim Task Force ANRI mempersiapkan alat restorasi arsip

Tengah (Sulteng), Direktur Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang juga selaku pimpinan tim _task force_, Kandar menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Sulteng diharapkan dapat menindaklanjuti koordinasi dan pendataan arsip di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tersentuh. Terhambatnya pendataan ini salah satunya dikarenakan tim Task Force tidak dapat masuk area perkantoran karena masih adanya genangan air.

Di samping itu, Dispersip Sulteng juga diharapkan benar-benar



Kerusakan arsip akibat bencana gempa dan tsunami

mempersiapkan diri sebagai posko penyelamatan arsip akibat bencana di seluruh provinsi Sulteng. Ini tentunya harus disiapkan pula sarana dan prasarana yang dibutuhkan di posko penyelamatan. Dispersip Sulteng pun

diharapkan dapat berkoordinasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah, OPD tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulteng, bahkan juga dapat dilakukan dengan organisasi politik, organisasi massa dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Sulteng. Selanjutnya, rangkaian kegiatan penyelamatan dan pelindungan arsip akibat bencana yang dilakukan oleh ANRI dan Dispersip Sulteng ini hasilnya akan dilaporkan secara komprehensif dan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait. (LNH)

PROF. DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI, PH.D EKONOM-DIPLOMAT YANG TAMPIL SAAT KRISIS

Pada tanggal 30 April 2018 telah dilaksanakan wawancara sejarah lisan terhadap Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D di studio wawancara sejarah lisan ANRI. Berikut ini rangkuman hasil wawancara sejarah lisan dengan beliau. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti merupakan salah satu ekonom terkemuka Indonesia. Pria yang dilahirkan di Rangkasbitung, Banten pada tanggal 25 November 1939 ini dalam darahnya mengalir *kebhinnekaan*. Ayahnya merupakan perpaduan Jawa-Madura, sedangkan ibunya perpaduan Sunda-Banten. Ayahnya memberi nama Dorodjatun karena terinspirasi nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak anak-anak Dorodjatun memperoleh pendidikan yang baik karena ayahnya seorang pejabat pemerintah kolonial.

Setelah lulus SMA Budi Utomo Dorodjatun melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Selama kuliah Dorodjatun menjadi anggota Dewan Mahasiswa UI dan aktif mengikuti berbagai kegiatan diskusi. Ketika mencapai jenjang sarjana muda, Dorodjatun dipercaya menjadi asisten dosen dari Prof. Daud Jusuf, Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Muhammad Sadli, serta Prof. J.B. Sumarlin. Selain itu, Dorodjatun juga pernah menjadi asisten peneliti bagi Prof. Ali Wardhana yang saat itu baru menamatkan studinya di Universitas Berkeley dan

diberi tugas oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Prof. Ali Wardhana pula yang mendorong Dorodjatun melanjutkan studi ke Universitas Berkeley di Amerika Serikat. Selama menempuh studi di Universitas Berkeley, Dorodjatun mempelajari *tax reform, budget*, dan ekonomi politik. Dalam pergaulan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, Dorodjatun dipercaya menjadi Wakil Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (Permias).

Memilih Tetap Menjadi *Moral Force*

Pada tahun 1969 Dorodjatun pulang ke tanah air dan melanjutkan karirnya sebagai tenaga pengajar di UI. Meski menjadi pengajar di universitas negeri, namun Dorodjatun memilih tidak mau bergabung dengan Golkar dan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Sikap kritisnya dituangkan dalam tulisan yang dimuat di berbagai surat kabar. Memasuki tahun

1970-an ketika investasi dari Jepang mulai masuk ke negara-negara di kawasan Asia. Dorodjatun dan para aktivis dari UI telah memperingatkan bahaya doktrin *Nippon in corporated* yang berpotensi menumbuhkan korupsi dan kolusi antara birokrat dan pengusaha. Pada waktu itu masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai praktik percukongan. Puncak dari gerakan moral itu adalah meletusnya Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) di Jakarta. Pada waktu itu mahasiswa memprotes kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka di Jakarta. Akibat dari peristiwa itu beberapa aktivis UI diamankan oleh Kopkamtib, termasuk Dorodjatun. Dorodjatun kemudian ditahan di Rumah Tahanan Militer Budi Utomo bersama aktivis lainnya. Meski berada di dalam tahanan para aktivis tetap melakukan diskusi secara sembunyi-sembunyi. Setelah diinterogasi sebanyak 35 kali dan



Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D

ditahan selama 7 bulan, Dorodjatun dilepaskan begitu saja tanpa melalui proses hukum. Lepas dari tahanan Dorodjatun tetap bekerja sebagai tenaga pengajar di UI. Namun dampak dari penahanan itu Dorodjatun sempat beberapa tahun tidak dapat pergi keluar negeri karena *passport*-nya dicabut. Akibatnya kuliah S3-nya terhambat padahal tinggal menulis disertasi saja. Selain itu karirnya sebagai PNS dihambat dan tidak boleh menulis di media massa, serta tidak boleh menjadi pembicara di seminar-seminar.

Uniknya meski telah di-*blacklist* oleh pemerintah, namun Dorodjatun tetap membina hubungan baik dengan para pembantu dekat Presiden Soeharto, baik dari kalangan sipil maupun militer. Hal itu dimungkinkan karena Dorodjatun memiliki kompetensi yang baik di bidang ekonomi. Ternyata kedua hal itu yang membuatnya tetap dipakai di lingkungan pemerintahan.

Tampil di Saat Krisis

Pada tahun 1979, tiba-tiba Dorodjatun dihubungi oleh Prof. Emil Salim untuk menjadi anggota Tim Ekonomi Indonesia pada sebuah konferensi regional di Kualalumpur. Sejak saat itu Dorodjatun diperbolehkan bepergian keluar negeri dan dipakai sebagai tenaga ahli di berbagai lembaga pemerintah.

Pada tahun 1988, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Soesilo Soedarmanto memintanya untuk masuk menjadi anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi (Bapertel). Karena Bapertel berkedudukan di bawah presiden maka Dorodjatun juga melapor ke Presiden Soeharto. Pada pertemuan tersebut nampak sekali Presiden

Soeharto kurang menyukainya.

Ketika terjadi krisis karena harga minyak dunia merosot, Prof. Ali Wardhana memanggil Dorodjatun untuk memikirkan sumber pendapatan alternatif untuk mengisi devisa negara yang mulai menipis. Dorodjatun mengusulkan untuk menggenjot pendapatan negara dari sektor pariwisata karena Indonesia memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara maksimal. Bersama-sama dengan Joop Ave yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pariwisata, Dorodjatun kemudian merancang berbagai kegiatan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke luar negeri. Salah satu program yang besar adalah *Visit Indonesia Year 1991*. Pada saat sektor pariwisata tengah menggeliat, pada tahun 1993 terjadi kebakaran hebat terhadap hotel *Grand Inna Bali Beach* di Sanur. Kejadian itu merupakan pukulan telak bagi PT HI Natour sebuah BUMN yang mengelola hotel-hotel milik pemerintah. Saat itu PT HI Natour tengah dilanda krisis keuangan karena merugi Rp 25 miliar per tahun. Guna memulihkan kondisi keuangan dan menata kembali manajemen, pemerintah menunjuk Dorodjatun sebagai Komisaris Utama PT HI Natour. Dalam beberapa tahun menangani PT HI Natour, Dorodjatun berhasil memulihkan kondisi keuangan BUMN tersebut. Saat Dorodjatun berangkat ke Amerika Serikat sebagai duta besar, keuangan PT HI Natour telah surplus Rp 36 miliar.

Ketika pada tahun 1992 Presiden Soeharto terpilih sebagai Ketua Gerakan Non Blok maka perlu dibentuk sebuah badan yang membantu tugasnya. Dorodjatun kemudian diminta oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menjadi *senior*

expert untuk masalah ekonomi pada Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok (BPK-GNB). Selanjutnya pada tahun 1995, APEC mendirikan sebuah badan penasihat bisnis yang diberi nama *APEC Business Advisory Council* (ABAC). ABAC terdapat di masing-masing negara anggota APEC, kemudian Dorodjatun ditunjuk menjadi anggota ABAC dari Indonesia.

Memasuki semester kedua tahun 1997 beberapa negara di Asia mulai dilanda krisis ekonomi. Dalam sebuah rapat di Bina Graha, Dorodjatun yang mendalami masalah ekonomi politik diminta menjelaskan sebab akibat munculnya krisis ekonomi di Asia di hadapan Presiden Soeharto. Instruksi yang keluar dari Presiden Soeharto untuk para menterinya, "siapa-siapa." Satu bulan kemudian Dorodjatun diundang rapat di Bina Graha, pada kesempatan itu Kepala Bulog Bustanil Arifin menanyakan kepada Presiden Soeharto, "apakah ABAC akan kehilangan Dorodjatun untuk sebuah jabatan baru?" Jawaban Presiden Soeharto, "kalau yang bersangkutan bersedia." Menyambut tawaran itu Dorodjatun hanya menjawab, "terima kasih Bapak Presiden." Pada saat itu Dorodjatun tidak tahu jabatan apa yang akan dipercayakan kepadanya. Pada malam harinya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menelepon dari Kuba menjelaskan bahwa Dorodjatun ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebuah jabatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, menjadi duta besar untuk sebuah negara *super power*. Pada bulan Februari 1998, Dorodjatun baru secara resmi dilantik oleh Presiden Soeharto sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Usai melantik Dorodjatun sebagai duta

PROFIL

besar, Presiden Soeharto memberikan instruksi lisan yang hingga saat ini isinya masih dirahasiakan oleh Dorodjatun. Saat Dorodjatun berangkat ke Amerika Serikat kurs US dollar terhadap rupiah telah mencapai Rp16.000, padahal ketika rapat pertama kali dengan Presiden Soeharto di Bina Graha baru mencapai Rp1.800. Saat menjadi duta besar, Dorodjatun pernah diminta bantuan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan untuk mencari bantuan pangan dalam bentuk apapun dari Amerika Serikat. Hal itu guna mengatasi kelangkaan bahan pangan di Indonesia. Dorodjatun berhasil memperoleh bantuan bahan pangan secara cuma-cuma sebesar 100.000 ton, namun harus diangkut dengan biaya dari pemerintah Indonesia. Jabatan sebagai duta besar diemban Dorodjatun hingga masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Menata Perekonomian Indonesia

Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menyusun Kabinet Gotong Royong, Dorodjatun ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pekerjaan besar yang harus dihadapi Dorodjatun adalah mengurangi dampak krisis 1997 yang masih terasa hingga tahun 2001. Apa yang terjadi di Indonesia saat itu, persis seperti yang dipelajari Dorodjatun saat mengambil S3 ekonomi politik di Universitas Berkeley. Pada saat itu Dorodjatun mempelajari negara-negara Amerika Latin yang perekonomiannya amburadul. Apa yang dipelajari Dorodjatun saat itu ternyata harus diterapkan di Indonesia beberapa tahun kemudian. Dalam mengatasi krisis itu Dorodjatun secara intens mewakili pemerintah dalam pertemuan dengan IMF untuk



Penyerahan secara simbolis arsip statis Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan (14/11)

pencairan pinjaman luar negeri. Langkah-langkah lain yang ditempuh adalah penguatan pengawasan di bidang keuangan dengan membentuk KPK, PPAK, LPS, dan pembubaran BPPN.

Usaha keras Dorodjatun dalam mengatasi krisis ekonomi ternyata tidak seirama dengan kondisi keamanan dalam negeri. Pada masa itu terjadi tiga peristiwa terorisme besar yaitu bom Bali I, pemboman hotel J.W. Marriott, dan pemboman Kedutaan Besar Australia. Tiga peristiwa itu menjadi pukulan telak bagi sektor pariwisata Indonesia yang telah dibangun beberapa tahun sebelumnya.

Tetap Berkarya Meski di Luar Pemerintahan

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menggantikan Presiden Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun diangkat sebagai *co chair Panel 45* bersama mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk merumuskan

usulan tentang reformasi PBB. Dalam rumusan tersebut disampaikan gagasan untuk merubah struktur organisasi PBB agar lebih adil. Namun upaya itu tidak berhasil karena tidak didukung oleh negara-negara lain. Pada tahun 2006 – 2011, Dorodjatun diangkat sebagai anggota Dewan Pengarah Lemhanas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski telah berada di luar pemerintahan, Dorodjatun tetap dipercaya memegang jabatan di berbagai perusahaan swasta, salah satunya menjadi Komisaris Utama BTPN. Kepercayaan itu menunjukkan bahwa kapasitas Dorodjatun memang sangat mumpuni di bidang perekonomian. Selain itu, Dorodjatun juga mempunyai kepedulian terhadap bidang kearsipan. Hal itu ditunjukkan dengan diserahkannya arsip pribadi miliknya secara resmi kepada ANRI pada tanggal 14 November 2018.

(Mudanto Pamungkas)

Desi Pratiwi

FINLANDIA, “A COUNTRY OF READERS”

Negara paling bahagia di dunia adalah Finlandia, versi World Happiness Report Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2018, yang dirilis dalam rangka Hari Kebahagiaan Internasional yang diperingati setiap tanggal 20 Maret. Penilaian ini diukur dari sisi pendapatan, harapan hidup sehat, dukungan sosial, kebebasan, kepercayaan kepada pemerintah, dan kemurahan hati. Negara berpenduduk 5,5 juta orang ini menempati peringkat paling stabil, paling aman, dan paling baik di dunia. Thegurdian.com (14/03/2018) menulis bahwa polisi Finlandia adalah yang paling terpercaya di dunia dan bank-banknya paling bagus.

Theguardian.com (15/05/2018) juga melaporkan bahwa PBB menyebut Finlandia sebagai negara paling terpelajar di dunia pada tahun 2016. Bangsa Finlandia adalah salah satu pengguna perpustakaan umum paling antusias di dunia, dengan seluruh penduduk di negara itu meminjam hampir 68 juta buku setahun. Mereka juga memanfaatkan situs web finna.fi nasional untuk mencari informasi yang berasal dari perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum.

Reformasi Undang-Undang Kearsipan

Finlandia merupakan bagian dari Swedia dari abad ke-12 hingga

tahun 1809, yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini dengan bahasa Swedia yang digunakan luas dan merupakan salah satu bahasa resmi. Kemudian, wilayah ini masuk dalam Kekaisaran Rusia sampai Revolusi Rusia 1917 yang menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Finlandia.

Didirikan pada tahun 1816,

lembaga kearsipan Finlandia saat itu merupakan bagian dari Senat Finlandia. Gedung arsip di Helsinki baru dibangun pada tahun 1890. Pada tahun 1939, lembaga kearsipan Finlandia menjadi lembaga pemerintah pusat sendiri dengan nama National Archives Service. Organisasi kearsipan ini memiliki dua nama yakni dalam bahasa Swedia (Riksarkivet), yang



Arsip Nasional Finlandia berada di Tiga Lokasi (Sumber: Arsip Nasional Finlandia)



Gedung Arsip Nasional Finlandia di Helsinki.
(Sumber: Wikipedia)

diadopsi pada tahun 1939, dan dalam bahasa Finlandia (*Kansallisarkisto*) sejak tahun 1994.

Sejak tahun 1880 dan seterusnya, para Direktur Arsip Nasional memperoleh gelar *State Archivist*. Jabatan *Director* kemudian diubah menjadi *Director General* pada tahun 1992, meskipun gelar *State Archivist* terus diberikan kepada Director General saat ini. Unikinya, antara tahun 1949 dan 1992, *State Archivist* juga diberikan gelar Profesor.

Amandemen Archives Act 1146/2016, Pasal 14 a menyatakan bahwa setelah digitasi, Arsip Nasional Finlandia akan memutuskan pemusnahan dokumen analog asli yang telah diperintahkan untuk dilestarikan secara permanen. Pemusnahan dokumen analog asli diizinkan tanpa

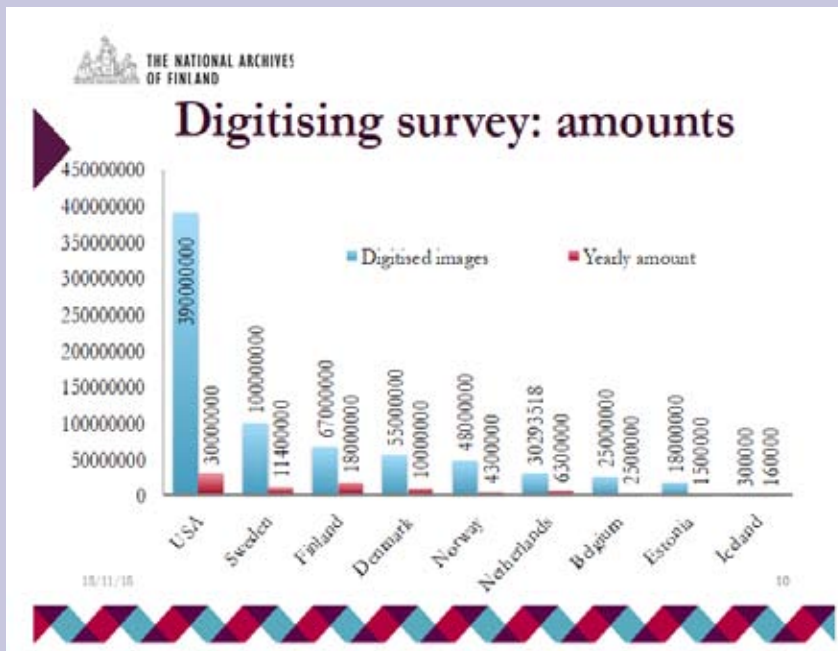
mengorbankan pelestarian permanen dari konten informasi atau integritas dan autentikasi dokumen asli serta jika hal itu tidak menyebabkan hilangnya nilai budaya atau sejarah atau kekuatan pembuktian hukum dokumen asli.

Reformasi Undang-Undang Kearsipan adalah kunci dalam reformasi National Archives Service, yang berubah namanya menjadi National Archives sejak awal tahun 2017. Arsip Nasional Finlandia saat ini berada di 3 lokasi, yaitu Helsinki (pusat Arsip Nasional), dan tujuh kantor Arsip Nasional di Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Turku, dan Vaasa (sebelumnya adalah arsip provinsi), serta Sámi Archive di Inari yang didirikan tahun 2012.

Arsip Nasional Finlandia, yang

berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempromosikan penggunaan dokumentasi warisan budaya yang berorientasi pada pelanggan, beroperasi sebagai ahli terkemuka dalam kegiatan kearsipan, mendukung metode memperbarui penelitian ilmiah, dan meningkatkan ketersediaan informasi kearsipan yang terbuka.

Nilai-nilai Arsip Nasional Finlandia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara internasional serta prinsip-prinsip etika dari sektor kearsipan dan komunitas riset. Nilai-nilai kunci yang membimbing operasional Arsip Nasional Finlandia adalah: keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kebebasan.



Arsip Nasional Finlandia Menduduki Posisi Terbanyak Ketiga dalam Digitalisasi Arsip Per Tahun. (Sumber: Arsip Nasional Finlandia)

Strategi 2020

Arsip Nasional Finlandia menyusun strategi tahun 2010–2015 untuk melakukan penelitian tentang kemungkinan pemusnahan bahan-bahan arsip kertas yang bernilai guna permanen, setelah didigitalisasi, asalkan nilai guna ilmiah dan kekuatan pembuktian dari bahan arsip tersebut tidak membahayakan.

Strategi tahun 2016–2020 disusun sejalan dengan Resolusi Pemerintah Finlandia tahun 2020 untuk meningkatkan ketersediaan informasi kepada publik, dengan titik keberangkatan pada kegiatan digitalisasi bahan-bahan arsip analog yang diserahkan ke Arsip Nasional Finlandia. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh *letter of intent* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Finlandia awal bulan Juli 2017 yang menetapkan bahwa semua bahan administrasi publik yang harus diarsipkan akan diarsipkan dalam media dan format digital, dan semua bahan-bahan



Dokumen Tertua yang Disimpan di Arsip Nasional Finlandia adalah Surat Tanggal 1 Oktober 1316 tentang Pelindungan Raja Biger Magnusson kepada Kaum Perempuan di Karelia (Sumber: Arsip Nasional Finlandia)

analog yang masih dimiliki badan publik akan didigitalkan hingga tahun 2030. Menurut Keputusan Pemerintah tanggal 21 Juni 2017, Arsip Nasional hanya akan menerima arsip digital untuk disimpan, yang berarti mayoritas bahan-bahan arsip analog akan dimusnahkan setelah digitasi.

Arsip Nasional Finlandia telah menentukan bahwa pemusnahan arsip setelah digitasi hanya berlaku untuk arsip yang dibuat setelah tahun 1992 dan memenuhi ketentuan yang

disebutkan sebelumnya. Finlandia bukan satu-satunya negara di mana Undang-Undang Kearsipannya mengizinkan pemusnahan arsip analog setelah digitalisasi tetapi negara ini menjadi pelopor dalam pelaksanaan pemusnahan arsip setelah digitasi.

Digitalisasi arsip telah dilakukan di Arsip Nasional Finlandia sejak tahun 1999, dan menjadi suatu sistem sejak tahun 2003. Saat ini, khazanah Arsip Nasional Finlandia berjumlah 210 kilometer linier, dengan arsip tertua berasal dari tahun 1316. Dari volume khazanah arsip yang ada, sejumlah 70 juta gambar digital ditambah 2 juta peta dan gambar arsitektur telah diakses dalam format elektronik oleh 90% pengunjungnya. Hal ini menjadikan Finlandia sebagai negara terbanyak ketiga di dunia dalam melakukan digitalisasi arsip per tahun, di bawah Amerika Serikat dan Swedia. Arsip Nasional Finlandia telah mendigitalkan delapan belas juta *file* pada tahun 2017.

Arsip Nasional Finlandia merencanakan proyek digitalisasi massal arsip pemerintah yang sebagian didanai oleh *European Regional Development Fund* (ERDP). Bulan Oktober–Desember tahun 2017, Arsip Nasional Finlandia melakukan survei kearsipan nasional untuk mengetahui jumlah arsip yang tersimpan di instansi pemerintah, dan menemukan total ada sekitar 380 kilometer linier arsip, yang sekitar 170 kilometer linier akan disimpan secara permanen dan ditransfer ke tempat penyimpanan arsip Nasional.

Proyek digitalisasi massal di sini mengacu pada digitalisasi bahan-bahan dalam skala besar sebagai proses terorganisasi dan industri. Digitalisasi massal berbeda dari

MANCANEGARA

metode digitalisasi lainnya, terutama karena proses digitalisasi tidak disesuaikan menurut jenis bahan-bahan atau organisasi, yang khas dalam digitalisasi ini dilakukan dalam bentuk proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mempersiapkan rencana implementasi untuk proses digitalisasi, mulai dari transfer bahan-bahan dari instansi pemerintah untuk digitalisasi dan berakhir pada konversi bahan-bahan menjadi format digital dan pemusnahan objek analog.

Pada lingkungan internasional yang lebih luas, dialog profesional secara khusus telah membahas pemusnahan setelah digitalisasi dengan cara yang kritis. Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Kearsipan yang baru, Arsip Nasional Finlandia melakukan survei melalui *mailing list* berbagai arsip nasional, jaringan ICARUS (*International Centre for Archival Research*), dan berbagai saluran media sosial. Survei itu ditanggapi oleh perwakilan dari empat puluh lembaga kearsipan, perpustakaan, dan perusahaan dari semua negara Nordik, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, dan Austria. Temuan utamanya adalah bahwa digitalisasi massal belum dilakukan di mana pun di dunia dalam konteks kearsipan. Karena manifestasi analog belum dimusnahkan setelah digitasi, referensi internasional tentang praktik yang baik tidak tersedia.

Hanya empat dari semua lembaga kearsipan yang menanggapi survei telah menyiapkan instruksi untuk memusnahkan objek penyimpanan analog setelah digitasi. Arsip Nasional Australia adalah satu-satunya responden yang menyiapkan instruksi untuk digitalisasi yang memungkinkan pemusnahan bahan-bahan analog. Selandia Baru tidak menanggapi



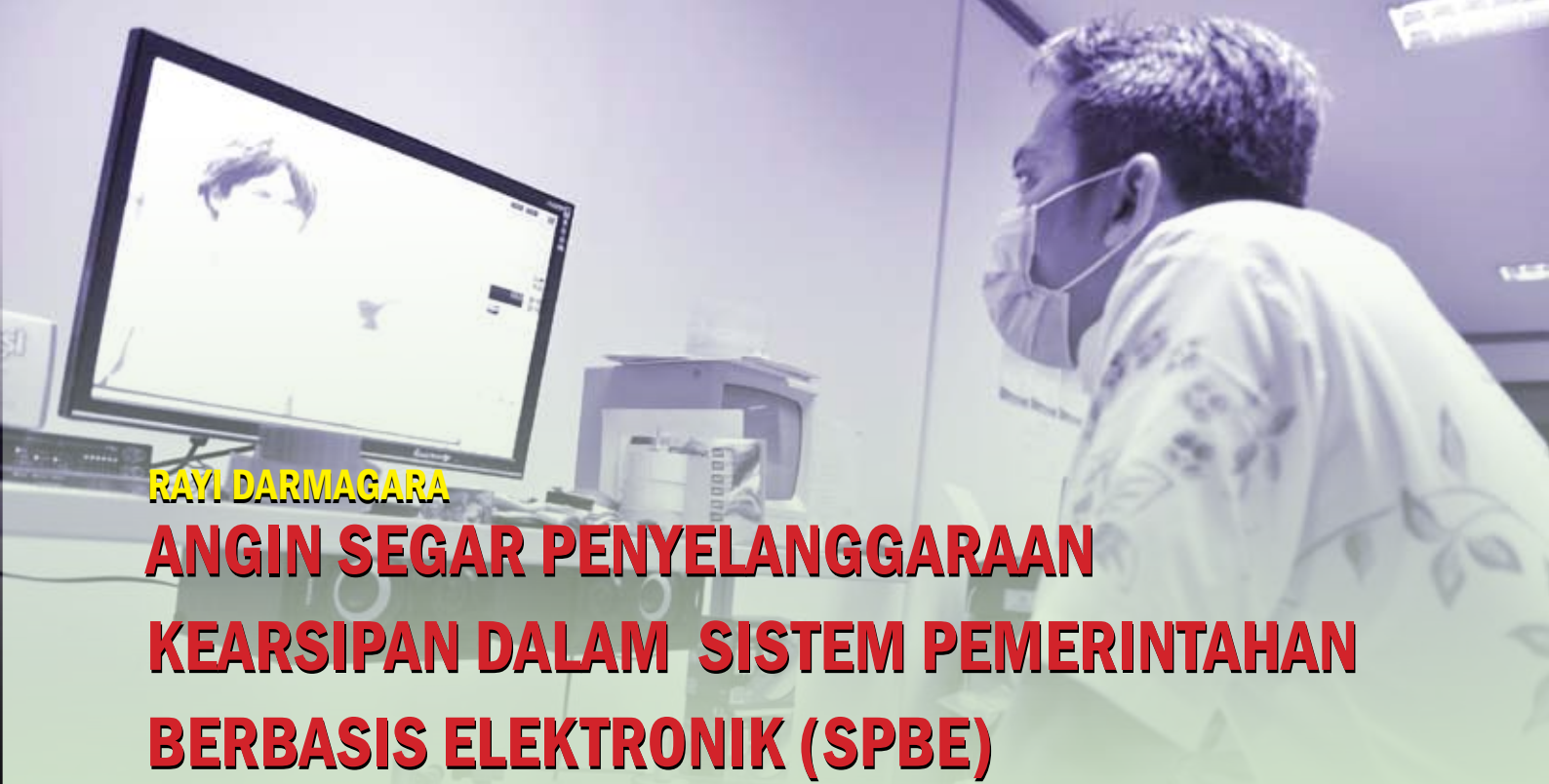
Proses Digitalisasi Arsip di Arsip Nasional Finlandia.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

survei, tetapi menerbitkan instruksi pemusnahan pada bulan Mei 2017.

Selain Finlandia, tiga negara (Belgia, Norwegia, dan Portugal) sedang mempertimbangkan persiapan instruksi pemusnahan, karena undang-undang nasional mereka saat ini memungkinkan pemusnahan bahan-bahan setelah digitasi. Meskipun demikian, Belgia dan Norwegia memiliki sikap kritis terhadap setiap pemusnahan. Arsip nasional Belanda, Islandia, Swedia, dan Republik Ceko, Arsip Sejarah Uni Eropa dan Arsip Kota Lüneburg menekankan pada tanggapan mereka bahwa mereka tidak siap untuk memusnahkan arsip analog warisan budaya yang ada dalam format arsip. Negara-negara yang menanggapi survei belum memulai atau merencanakan digitalisasi bahan-bahan arsip yang sangat baru,

dan digitalisasi telah difokuskan pada peningkatan kegunaan bahan-bahan arsip yang sudah ada dalam lembaga kearsipan mereka, bahan-bahan arsip yang paling sering digunakan atau bahan-bahan arsip yang paling berharga dalam hal budaya sejarah.

Bagaimanapun, proses digitalisasi massal ini memakan waktu lebih dari sepuluh tahun, dan itu akan memerlukan koordinasi yang efektif serta, yang terpenting, komitmen yang kuat. Instansi pemerintah harus berkomitmen untuk jadwal dan instruksi digitalisasi yang ditetapkan bersama untuk persiapan bahan-bahan. Arsip Nasional Finlandia harus berkomitmen memimpin proses digitalisasi, dan kementerian yang mengarahkan proses harus berkomitmen untuk menetapkan tujuan dan keberlangsungan operasional.



RAYI DARMAGARA

ANGIN SEGAR PENYELANGGARAAN KEARSIPAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

L ahirnya sebuah peraturan memberikan perubahan pada seluruh dimensi dan aspek kehidupan, tidak terkecuali dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ada dimensi pengaturan dan perlunya landasan hukum yang kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan pelaksanaan secara elektronik. Dimensi pelaksanaan pemerintahan yang dahulu berbasis non-elektronik (kertas) dengan kemajuan teknologi mengarah pada pelaksanaan pemerintahan menggunakan sistem elektronik. Tentu saja ini sebuah inovasi yang perlu diperkuat dengan regulasi sehingga terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Peraturan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintah merupakan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan regulasi ini memberikan sepenuhnya kepastian hukum bagi penyelenggara dan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peraturan Presiden tentang SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, jelas bahwa penyelenggara SPBE baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mendapatkan angin segar dalam proses kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Presiden yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2018 memberikan harapan terhadap pelaksanaan birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya. Tak ayal hal tersebut juga memberikan harapan bagi dunia kearsipan dengan tujuan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu. Terdapat satu paragraf yaitu pada Pasal 63 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang membahas tentang Kearsipan. Kearsipan merupakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung kegiatan pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Respon positif memang harus

HUKUM

dilakukan di dunia kearsipan dalam melaksanakan tugasnya terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks sarsip milenial dan revolusi industri 4.0. Masyarakat sudah sangat melek teknologi sehingga berharap pelayanannya (birokrasi) juga mampu menggunakan teknologi dalam memenuhi kebutuhan publik. Pelayanan publik dalam bentuk elektronik melalui berbagai portal e- (elektronik) menghasilkan transaksi arsip elektronik. Proses yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga atau pemerintahan daerah secara fungsi merupakan jenis penciptaan arsip, sehingga seharusnya penyelenggaraan portal elektronik tersebut bersandar pada standar kearsipan yang tentunya harus dipahami kedepan bahwa tanggung jawab penyelamatan arsip dalam hal memiliki nilai kesejarahan menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan di tingkat nasional oleh ANRI dan di tingkat daerah oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Sudah sepatutnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan membuat kebijakan yang lebih fungsional dan terstandar terhadap fungsionalitas kearsipan bagi penyelenggara layanan publik berbasis elektronik. Sedikit hal yang bergeser pada konteks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peraturan Presiden ini adalah kualifikasi kearsipan menjadi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diantara dua jenis layanan yang kedua adalah layanan publik berbasis elektronik. Pada hal lebih jauh layanan publik yang berbasis elektronikpun seharusnya menggunakan standar kearsipan.

Hal ini dapat dipahami bahwa



Fragmen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

layanan kearsipan diposisikan sebagai layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di instansi pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Presiden menganggap masalah arsip itu sebagai sektor sendiri yang sekilas dilihat pada akhirnya saja sebagai arsip, padahal arsip mensyaratkan perekaman kegiatan atau peristiwa dari awal penciptaan. Yang menjadi angin segar dan harus segera diwujudkan adalah amanat pembangunan dan pengembangan aplikasi umum, yaitu aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Selain itu diperlukan integrasi layanan kearsipan yang dilakukan melalui:

pertama, bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua, penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan dan ketiga penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Tantangan kedepan Peraturan Presiden SPBE

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beberapa hal yang menjadi tantangan kedepan, pertama, ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) bahwa pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi umum termasuk kearsipan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai

berlaku. Merujuk kembali pada Pasal 37 ayat (1) bahwa setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

Walaupun kemudian Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Terdapat persyaratan bahwa telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan, melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis, melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum, dan mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Kedua, penyusunan keterpaduan proses bisnis pengelolaan kearsipan yang diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar instansi pusat dan pemerintah daerah. Proses Bisnis dalam peraturan presiden ini diartikan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

Jika dilihat pada bagaimana ANRI sebagai penanggung jawab penyelenggara kearsipan nasional menetapkan kebijakan di bidang arsip elektronik, struktur yang paling mendekati adalah Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis merupakan model aplikasi yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip. Karakteristik aplikasi

SIKD diantaranya tidak mengandung komponen sistem yang berlisensi, dapat digunakan untuk mengelola arsip dinamis dalam format elektronik maupun nonelektronik termasuk metadatanya, dapat dijalankan pada platform sistem operasi server berbasis *windows*, dapat diakses melalui jaringan dengan menggunakan teknologi berbasis *website* dan dapat dijalankan secara optimal menggunakan *browser* internet explorer versi 7.

Terhadap peraturan tersebut, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis apakah mampu menjawab amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pilihan kebijakan SIKD sebagai standar/model menjadi sangat penting yang difungsikan secara komprehensif dalam pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis yang terintegrasi pada SIKS bagi penyelamatan arsip pada lembaga kearsipan demi mendukung Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Sehubungan dengan penguatan pada pengelolaan arsip dinamis secara elektronik, tentu perlu dipastikan bahwa pencipta arsip bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen tata kelola arsip dinamis yang meliputi penetapan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. Sehingga pelaksanaan pengaturan

pengelolaan arsip secara elektronik tidak hanya sejalan dengan ketentuan pada peraturan presiden PBSE tetapi juga menjamin ketersediaan arsip elektronik yang autentik, utuh dan terpercaya.

Selain itu keterkaitan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis Untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIKN dan JIKN, Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik, dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik di Pencipta Arsip perlu dilakukan revaluasi sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Memahami Peraturan Presiden tentang SPBE tentu berawal dari diperlukannya suatu forum sosialisasi mengingat terdapat banyak stake holder yang terlibat sebut saja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara sehingga angin segar dan tantangan untuk dunia kearsipan dapat diwujudkan.

REVOLUSI DIGITAL DI DUNIA ARSIP

Revolusi Industri 4.0 dicirikan dengan munculnya kegiatan manufaktur yang terintegrasi melalui pengguna teknologi informasi dan komunikasi secara massif dengan penekanan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya. Menghadapi era revolusi industri 4.0, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dituntut mampu mentransformasikan sistem kearsipan yang masih manual ke sistem digital.

Untuk dapat mewujudkan transformasi tersebut dibutuhkan beberapa strategi diantaranya mengefektifkan program pembinaan kearsipan. Ini perlu dilakukan untuk membangun komitmen pimpinan nasional dan daerah untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan *environment*, *culture and digital skills* di lembaga kearsipan maupun pencipta arsip.

“Yang kedua mengembangkan sistem digital dengan cara selalu mencoba dan penerapan prototipe

teknologi terbaru, *Learning by doing!*, dengan menyempurnakan dan mengimplementasikan e-arsip baik sebagai aplikasi bagi dipakai (*generic*) dalam *e-office* maupun aplikasi layanan kearsipan (spesifik) dalam rangka implementasi *electronic government* untuk mempercepat reformasi birokrasi,” ujar Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Berikutnya yang harus dilakukan adalah mengembangkan sistem akses triple A yakni *anytime*, *anywhere*, *anyhow*, melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang dioptimalkan sebagai infrastruktur akses arsip secara nasional. Ini juga sebagai bagian dari upaya terbentuknya *digital history*, *digital memory* dan *digital identity*.

ANRI dituntut mampu menyusun kurikulum dan menyelenggarakan pendidikan kearsipan yang telah memasukan materi *human-digital skills*, untuk mempersiapkan SDM

Arsiparis yang mampu mengelola arsip yang tercipta di era 4.0. Dan tahap terakhirnya adalah sosialisasi kearsipan untuk meningkatkan literasi kearsipan secara massif.

Dalam menyongsong Revolusi Industri 4.0, Mustari mengaku bahwa banyak tantangan yang sangat berat bagi Arsiparis, antara lain adalah ekosistem kearsipan yang masih buruk. Misalnya dukungan pimpinan nasional, daerah, instansi, yang pada umumnya masih rendah mengakibatkan pengelolaan arsip masih belum tertib. Kemudian masalah budaya atau kultur yang masih belum seperti negara maju.

“Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi oleh sebagian besar arsiparis juga masih memprihatinkan, sehinggaberdampakpada pengelolaan arsip elektronik. Pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik sudah banyak dilakukan di instansi pemerintah, maupun swasta saat ini, sehingga arsiparis harus melihat ini sebagai bagian dari program

manajemen kearsipan” terang Mustari.

Transformasi kearah sistem digital (elektronik) dilakukan oleh ANRI melalui persiapan lingkungan strategis (ekosistem) untuk pengelolaan arsip menuju budaya digital, penerapan sistem informasi kearsipan digital, dna peningkatan akses digital ke informasi arsip keseluruhan instansi pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan SIKD, SIKS, dan SIKN-JIKN. Termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas infrastruktur TIK baik data *center/e-depot*, jaringan dan *bandwidth*.

Salah satu inovasi teknologi informasi yang telah digunakan oleh ANRI adalah dengan *cloud computing*. *Cloud computing* telah digunakan oleh ANRI untuk menghimpun informasi arsip kedalam *Cloud-SIKN* dan memberikan layanan arsip kepada publik melalui *jikn.go.id* dan arsip VOC digital dalam *www.sejarahnusantara.anri.go.id*.

Menurut Mustari, saat ini ANRI juga terus berupaya mengembangkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). JIKN berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan.

“Dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, JIKN mendukung agenda Nawa Cita 2015-2019 untuk membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, serta mewujudkan memori kolektif bangsa. Saat ini, publik sudah dapat mengakses informasi arsip yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah melalui *jikn.go.id*” terangnya.

Good Governance dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa

Di periode 2015-2019, Mustari mencanangkan visi ‘Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif bangsa’ untuk lembaga yang dipimpinnya itu. Sejak mencanangkan visi tersebut, telah ditetapkan pula misi dan strategi yang diharapkan dapat mencapai visi tersebut.

Misi pertama, mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja dan objek pemeriksaan. ANRI sudah mengefektifkan pengawasan kearsipan yang sejak tahun 2016 untuk mengetahui peta permasalahan kearsipan nasional secara empiris. Kemudian arsip juga sudah menjadi salah satu indikator untuk penilaian LAKIP dan kematangan reformasi birokrasi kementerian, lembaga dan daerah. Dengan demikian fungsi arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan pilar *good governance* dapat dioptimalkan. Memang implementasinya belum sempurna dan akan terus senantiasa ditingkatkan.

“Kedua mewujudkan pengelolaan arsip aset melalui aplikasi *records system*. Pengelolaan arsip aset sudah dilaksanakan di K/L/D walaupun belum maksimal, sedangkan pengelolaan secara elektronik, misalnya lembaga dan daerah belum jalan” terangnya

Hal ini terkait dengan kondisi kearsipan di kementerian, lembaga dan daerah yang belum tertib, sehingga mereka tidak dapat menentukan mana arsip yang harus diselamatkan untuk kepentingan nasional, sebagai memori kolektif bangsa.

“Dalam konteks ini, kami prioritaskan untuk melakukan penyelamatan dan perlindungan arsip kepresidenan dengan program ‘*Presidential Archives*’, sebagai *key*

factor mentransformasikan arsip menjadi ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai benda mati atau informasi saja, tetapi sebagai media pembelajaran anak bangsa mengenai para pemimpin nasionalnya” ujarnya.

GNSTA Berbasis Teknologi

Sejak dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 17 Agustus 2016 yang lalu, semakin menguatkan ANRI untuk mewujudkan tertib arsip secara nasional. Menurut Mustari, GNSTA merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga negara dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional.

Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, arsiparis memiliki tantangan dalam pengelolaan arsip di masa mendatang. Di masa depan, arsip-arsip yang tercipta akan berbasis teknologi digital dan *cloud computing*. Untuk itulah ANRI terus berupaya mengembangkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Mustari mengatakan, arsip secara filosofis memiliki peranan yang strategis dalam konteks hak kepemilikan. “Masih banyak di antara kita tidak peduli terhadap arsip. Salah satu dampaknya adalah Pemda banyak kehilangan aset, karena asetnya banyak diklaim oleh masyarakat. Itu kenyataan. Jika terjadi di banyak daerah berapa kira-kira kerugian yang dialami negara kita. Belum lagi banyak desa konflik mempeributkan tanah yang potensial, sehingga filosofi arsip memiliki peranan yang penting” terangnya. (JJ)

S. Nooryani

ARSIP RAPI, MENENANGKAN HATI

Pagi itu Rania bangun lebih pagi dari biasanya. Hari ini adalah hari pertama ia masuk kerja di kantor yang baru. Di kantor tempat Rania bekerja, setiap lima tahun sekali diadakan rotasi pegawai. Rania yang dulu bekerja di bagian administrasi di Fakultas Hukum, sekarang dipindah ke bagian administrasi di Fakultas Psikologi.

Sesampainya di kantor yang baru, Rania diperkenalkan dengan seluruh staff yang ada di Fakultas Psikologi. Mereka rata-rata usianya lebih muda daripada Rania.

Rania mulai bekerja hari itu juga. Sebelum mulai bekerja ia melihat-lihat cara penyimpanan arsip yang ada di kantor yang baru. Ia agak kebingungan melihat cara penyimpanan arsipnya. Karena surat masuk dan surat keluaranya di pisah, sehingga tidak memberkas.

Ia kemudian mulai menata arsip yang ada di mejanya terlebih dahulu, agar ia lebih nyaman dalam bekerja. Satu demi satu surat ia baca untuk menentukan masalahnya, sampai arsip yang menumpuk di mejanya sudah tersimpan rapi di filling cabinet.

Pada suatu hari ada seorang dosen yang baru pulang dari tugas belajar di luar negeri, namanya Pak Arman, ia menemui Rania. Ia akan mengajukan pengaktifan kembali sebagai dosen, karena telah lulus S3 di Jepang. Karena Rania sebagai koordinator Tata Usaha di Fakultas Psikologi, maka sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus

pengaktifan kembali dosen yang baru lulus kuliah.

“Bu Rania, saya mau mengajukan pengaktifan kembali, mohon untuk diurus ya Bu,” kata Pak Arman.

“Baik, pak,” jawab Rania dengan ramah.

Kemudian Rania mencari berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan pengaktifan kembali. Tetapi ada satu surat yang tidak ada. Ia kebingungan, karena surat itu sangat penting, yaitu Surat Keputusan tentang Tugas Belajar atas nama Pak Arman.

“Wah, dimana SK Tugas Belajar Pak Arman?” gumam Rania. “Kalau sampai tidak ada, pasti pengaktifan kembalinya akan terhambat.”

Rania membuka lembar demi lembar surat yang ada diberkas Pak Arman. Tetapi surat yang dicarinya tak kunjung juga ditemukan.

“Pak Firman, silahkan ke ruangan saya, saya ingin menanyakan sesuatu,” kata Rania kepada Firman, salah satu pegawai yang sudah bekerja cukup lama di Fakultas Psikologi.

“Ya Bu,” jawab Firman sambil berjalan menuju ruangan Rania.

“Maaf pak, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak,” kata Rania pelan. “Apa Bapak tahu SK Tugas Belajar atas nama Pak Arman disimpan dimana?”

“Wah...saya tidak tahu, Bu,” jawab Firman dengan wajah kebingungan. “Solanya saya tidak pernah bertugas di bagian arsip,” lanjutnya.

“Oh, begitu. Siapa selama ini yang bertugas di bagian arsip?”

“Pak Ardi, Bu. Ia selama ini yang bertugas di bagian arsip,” katanya.

“Kalau begitu, tolong panggilkan Pak Ardi ya Pak,” pinta Rania kepada Pak Firman.

“Baik, Bu,” kata Firman sambil keluar dari ruangan Rania.

Tak lama kemudian Ardi yang disebut Firman sebagai petugas di bagian arsip datang menemui Rania.

“Ada apa Bu, Ibu memanggil saya?” tanya Ardi.

“Iya Pak, silahkan duduk,” kata Rania sambil mempersilahkan duduk kepada Ardi.

“Pak, maaf saya mau tanya, apakah Bapak selama ini yang bertugas di bagian arsip?”

“Iya, Bu. Memangnya ada apa Bu?” tanyanya.

“Jadi begini Pak Ardi, Pak Arman sudah selesai tugas belajarnya dari Jepang. Saat ini beliau ingin mengajukan pengaktifan kembali sebagai dosen. Untuk mengaktifkan kembali sebagai dosen, maka harus melampirkan SK Tugas Belajar, tetapi SK tersebut tidak ada di dalam berkas beliau. Apa Bapak tahu, arsip tersebut disimpan dimana?”

“Semua arsip yang menyangkut perseorangan, selalu saya simpan di *personal file* atas nama masing-masing, Bu,” jawab Ardi tegas. “Jadi saya rasa, SK Tugas Belajar atas nama Pak Arman, ada di berkas atas nama beliau.”

“Saya sudah mencarinya Pak, tetapi di *personal file* beliau tidak ada SK itu,” jawab Rania.

“Aduh, dimana ya Bu?” tanya Ardi merasa khawatir, karena arsip menjadi tanggung jawabnya. Kalau ada arsip yang hilang, maka ia pasti akan ditegur oleh pimpinan, apalagi arsip tersebut adalah arsip vital, yang seharusnya disimpan dengan baik.

“Coba Bu, saya akan mencari di *personal file* nya,” kata Ardi seakan tidak percaya.

“Silahkan,” kata Rania sambil menyodorkan berkas arsip milik Pak Arman.

Sambil membolak-balik arsip yang ada ditangannya, Ardi membaca dengan teliti arsip yang dipeganginya.

“Iya, SK Tugas Belajar atas nama Pak Arman tidak ada,” gumamnya.

“Coba Bu, akan saya cari ditempat lain,” kata Ardi kepada Rania.

“Silahkan, Pak,” kata Rania.

Ardi segera keluar dari ruangan Rania menuju ruang kerjanya. Ia kemudian membuka *filling cabinet* yang ada di ruangnya. Semua laci dibuka dan dikeluarkan isinya, namun arsip yang dicarinya tidak ditemukan. Keringat dingin mulai keluar dari keningnya, ia panik karena arsip itu sangat diperlukan oleh Pak Arman.

Pada saat Ardi sedang kebingungan mencari arsip, Firman datang. Akhirnya Firman membantu Ardi mencari arsip yang dimaksud. Bahkan semua lemari yang ada di ruangan Ardi dibuka, dan dikeluarkan isinya.

Hari semakin sore, arsip yang dicarinya belum ketemu juga.

“Bagaimana Pak, sudah ketemu?” tanya Rania yang tiba-tiba muncul di ruangan Ardi. Ardi semakin gugup, karena belum menemukan arsipnya.

“Kita cari lagi besok saja Pak, hari sudah sore, sudah saatnya pulang kantor,” kata Rania mempersilahkan Ardi dan Firman pulang, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 WIB.

“Terimakasih Bu, besok akan saya coba cari lagi,” kata Ardi.

“Iya, Pak,” kata Rania sambil berjalan menuju pintu keluar kantor. Ardi dan Firmanpun pulang ke rumah masing-masing.

Sesampai di rumah, Ardi duduk di ruang keluarga sambil menikmati kopi. Sementara di luar hujan rintik-rintik membuat suasana semakin dingin. Tetapi pikiran Ardi tidak bisa dingin, ia masih mengingat – ingat dimana arsip itu ia simpan.

Keesokan harinya Ardi melanjutkan mencari arsip Pak Arman. Kali ini ia mencari di tumpukan kardus yang ada di sudut ruangnya. Banyak arsip-arsip tiga sampai lima tahun yang lalu, ada di dalam kardus itu. Satu persatu ia buka, dan ia baca. Dan pada kardus terakhir, dan ditumpukan paling bawah ia menemukan arsip yang dicarinya, yaitu SK Tugas Belajar atas nama Pak Arman.

“Alhamdulillah...,” kata Ardi sambil memeluk arsip yang ditemukannya.

Kemudian ia berjalan dengan cepat menuju ruangan Rania.

“Bu, arsipnya ketemu,” katanya sambil tertawa bahagia.

“Alhamdulillah...,” kata Rania bersyukur, ia bahagia karena arsip itu sangat penting untuk mengajukan pengaktifan kembali Pak Arman. Kalau sampai tidak ketemu, pasti akan melalui proses yang sangat panjang, dan pasti akan sangat melelahkan.

“Pak Ardi, coba duduk sebentar, saya ingin bicara,” kata Rania meminta Ardi untuk duduk.

“Baik Bu,” kata Ardi.

“Belajar dari pengalaman ini Pak, maka Bapak harus lebih teliti lagi dalam menyimpan arsip. Untung arsipnya ketemu, kalau tidak, maka akan memerlukan proses yang sangat panjang untuk mengurusnya lagi,” kata Rania menasihati Ardi.

“Baik Bu, maafkan saya Bu, selama ini saya kurang teliti dalam menyimpan arsip,” kata Ardi menyesali perbuatannya.

“Baiklah, mulai sekarang Bapak sebaiknya menata kembali arsip – arsip yang ada di ruangan Bapak,

agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini ya Pak,” kata Rania. “Dan jangan menganggap arsip yang berusia tiga sampai lima tahun itu adalah arsip yang sudah tidak terpakai, tetapi Bapak harus melihat jadwal retensi arsipnya apakah arsip tersebut sudah inaktif, atau boleh dimusnahkan. Bahkan ada kemungkinan arsip tersebut adalah arsip statis karena bernilai kesejarahan,” kata Rania panjang lebar.

“Iya Bu, saya akan menata arsip yang ada di ruangan saya, dan akan melihat jadwal retensi arsipnya,” kata Ardi bersemangat.

Akhirnya selama kurang lebih tiga bulan Ardi dibantu oleh Firman, menata arsip yang ada di ruangnya. Sebagian besar arsip yang ada adalah arsip kepegawaian, yang belum boleh dimusnahkan, maka harus disimpan dengan rapi. Ada juga beberapa Surat – Surat Keputusan Rektor yang sudah habis retensinya tetapi bernilai kesejarahan, maka arsip tersebut disimpan dan akan diserahkan ke Unit Kearsipan di Universitas, karena arsip itu termasuk arsip statis.

Rania tersenyum lega melihat perkembangan Ardi, ia nampak semakin rajin dan lebih teliti dalam menangani arsip yang ada di ruangnya. Dan yang paling penting arsip yang ada di Fakultas Psikologi menjadi rapi dan mudah ditemukan kembali.

Arsip adalah aset yang sangat berharga, maka arsip harus diperlakukan dengan baik, dan disimpan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku. Karena jika arsip tidak dipelihara dengan baik, jika suatu saat ada masalah yang memerlukan arsip sebagai alat bukti, maka kita akan menghadapi kesulitan. Untuk menghindari masalah, misalnya ada temuan dari pemeriksa, maka sebaiknya semua arsip yang ada di kantor kita harus ditata dengan rapi, dan mudah untuk ditemukan kembali.

IPB JALIN KERJA SAMA DENGAN ANRI DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

Bogor, ARSIP. Perpustakaan dan Unit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB) IPB bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Seminar Nasional “Kesiapan Arsiparis dan Pustakawan Memasuki Era Revolusi Industri 4.0”, Selasa (10/7) di Kampus IPB Dramaga. Pada acara ini, dilaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB dengan PNRI, IPB dengan ANRI.

Penandatanganan kerjasama IPB dengan PNRI ini dilakukan oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Kepala PNRI, Muhammad Syarif Bando dan Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, MPA. IPB juga memfasilitasi MoU antara PNRI, ANRI dan beberapa perguruan tinggi di wilayah Bogor dan sekitarnya, diantaranya dengan Universitas Pertahanan Indonesia, Universitas Nusa Bangsa, Universitas Djuanda, Universitas Ibnu Khaldun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Universitas Islam Assyafiyah, Universitas Siliwangi dan Universitas Pakuan.

Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan ucapan selamat, dengan adanya kerjasama PNRI, ANRI dengan IPB dan perguruan tinggi wilayah Bogor serta sekitarnya dapat menjadikan sinergi semakin kuat. Rektor IPB menyebutkan pustakawan harus dapat membaca tanda-tanda perubahan. “Dengan membaca tanda-tanda perubahan zaman, maka perpustakaan dapat menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutur Arif Satria.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala PNRI, Muhammad Syarif Bando. “Bisa jadi tugas seorang pustakawan harus berubah. Kita dituntut bergerak memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Seberapa besar masyarakat mengakses perpustakaan khususnya Perpustakaan Nasional.



Rektor IPB, Arif Satria (tengah), Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI,) Muhammad Syarif Bando (kanan) dan Kepala ANRI, Mustari Irawan (kiri) menandatangani nota kerjasama IPB, ANRI dan PNRI di bidang kearsipan dan perpustakaan di kampus IPB, Bogor, Jawa Barat, 10 Juli 2018

Seberapa besar kemampuan Perpustakaan Nasional menghimpun semua informasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Budaya baca Indonesia rendah. Saya masih ragu di pedalaman Indonesia, masyarakat rajin membaca buku. Bisa jadi satu buku dibaca oleh 15 ribu orang. Artinya Indonesia lapar buku,” papar Muhammad Syarif.

Pada kesempatan ini, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan juga menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional Kearsipan dan Perpustakaan “Kesiapan Arsiparis dan Pustakawan Memasuki Era Revolusi Industri 4.0”, Selasa (10/7) di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat. Mustari Irawan menyampaikan materi mengenai Filosofi, Makna dan Implementasi Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

Dalam paparannya, Mustari menyampaikan bahwa sasaran GNSTA yakni terwujudnya tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib SDM kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip,

dan tertib pembinaan kearsipan.

Mustari juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, Arsiparis memiliki tantangan dalam pengelolaan arsip di masa mendatang, diantaranya arsip-arsip yang tercipta akan mengarah pada arsip berbasis teknologi digital dan *cloud computing*. Mustari menambahkan bahwa ANRI terus berupaya mengembangkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Mustari menambahkan bahwa arsip secara filosofis memiliki peranan yang strategis dalam konteks hak kepemilikan. “Masih banyak diantara kita tidak peduli terhadap arsip. Salah satu dampaknya adalah Pemerintah Daerah (Pemda) banyak kehilangan aset, karena asetnya banyak diklaim oleh masyarakat. Itu kenyataan. Jika terjadi di banyak daerah berapa kira-kira kerugian yang dialami negara kita. Belum lagi banyak desa konflik memperebutkan tanah yang potensial, sehingga filosofi arsip memiliki peranan yang besar,” terang Mustari. (is)

JIKN: MENJAGA KEKINIAN, MEMASADEPANKAN MASA SILAM

Jakarta, ARSIP. ANRI selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Acara Rakornas dibuka oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan di Hotel Merlynn Park Hotel, Jakarta.

Penyelenggaraan Rakornas SIKN dan JIKN merupakan sarana koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan, sebagaimana diamanatkan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Penyelenggaraan Rakornas SIKN dan JIKN tahun 2018 yang bertemakan “Menjaga Kekinian dan Memasadepankan Masa Silam”, memiliki pengertian menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas penyelenggaraan negara serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Rakornas ini dimaksudkan untuk: mensosialisasikan aplikasi SIKN dan *website* JIKN secara nasional, mendorong simpul jaringan guna membangun khazanah arsip statis dan memberikan layanan informasi arsip kepada publik, mendorong simpul jaringan untuk berperan aktif dan berkelanjutan memasukkan informasi arsip dinamis dan statis yang bersifat terbuka, serta mengoordinasikan simpul jaringan dalam satu kesatuan JIKN.

Tujuannya penyelenggaraan adalah untuk pemerintahan mewujudkan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan



Kepala ANRI, Mustari Irawan membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Hotel Merlynn Park Hotel, Jakarta, 24-26 Juli 2018.

efisien, melalui penyediaan informasi arsip secara daring (*online*).

Duta Arsip, Rieke Dyah Pitaloka yang hadir dan memberikan sambutan, mengingatkan kembali pentingnya makna filosofis arsip. “Arsip adalah peradaban suatu bangsa, arsip adalah sumber kebudayaan suatu bangsa, tanpa arsip, saya yakin akan kehilangan kepribadian dan karakter jati dirinya.

Lebih lanjut Rieke menambahkan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah memiliki peranan yang sangat strategis sebagai simpul dalam menjaga kedaulatan NKRI. “Hal yang tidak kalah penting, di tengah ancaman disintegritas bangsa, maka satu hal yang tidak boleh dilupakan, kehadiran Bapak Ibu di daerah-daerah, kinerja Bapak Ibu daerah-daerah adalah salah satu simpul terpenting untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tutur Rieke.

Sementara itu Kepala ANRI, Mustari Irawan mengajak para pimpinan lembaga untuk menjadi simpul jaringan. “Pada kesempatan ini saya berharap sekali kepada Bapak dan Ibu

sekalian, baik itu dari perguruan tinggi, kementerian lembaga, mari sama-sama menjadi bagian dari simpul jaringan. Karena sekarang ini tuntutan masyarakat sangat tinggi sekali terhadap aksesibilitas informasi”, ungkap Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Adapun para narasumber yang menyampaikan materi pada acara Rakornas SIKN dan JIKN kali ini adalah sebagai berikut : pertama, Prof. Zaenal A. Hasibuan Mantan Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Kedua, Yudho Giri Sucahyo, M.Kom, Ph.D Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Ketiga, Samuel Abrijani Pangarepan, B.Sc Dirjen APTIKA, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keempat, dari Kementerian Dalam Negeri. Kelima, Drs. Sandjaja Sarwohadi, MPM Mewakili Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Drs. Imam Gunarto Deputy Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI. (is)

TRAINING ON RECORD AND ARCHIVES MANAGEMENT FOR PALESTINE

Bogor, ARSIP. Kepala ANRI, Mustari Irawan, membuka program *Training on Records and Archives Management For Palestine: Management of Electronic Records*.

Acara pembukaan dihadiri oleh Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi, *Executive Director of National Archives of the Republic Philippines*, Mr. Victorino Mapa Manalo dan Counselor of the Palestine Embassy, Mr. Taher Hamad serta Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri RI, Mohammad Syarif Alatas.

Dalam sambutannya Kepala ANRI menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah berubah dengan cepat. Hal ini membawa pengaruh yang signifikan bagi negara dan bangsa khususnya di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang efektif dan akuntabel, aparatur negara harus melakukan transparansi diberbagai bidang, termasuk didalamnya transparansi di bidang layanan informasi publik dan akses publik.

Aparatur negara harus menjadi profesional dan kreatif dalam penerapan kemajuan teknologi. Menjadi kreatif di bidang layanan informasi publik dan akses akan berarti bahwa aparatur negara dapat mengembangkan metode baru berdasarkan catatan dan manajemen arsip. Hal ini sangat penting karena catatan dan arsip adalah sumber informasi.

Kepala ANRI menyampaikan tujuan dilaksanakan program *Training on Records and Archives Management For Palestine* adalah:

Pertama, pelatihan ini dilakukan untuk berbagi pengetahuan tentang catatan dan manajemen arsip terutama di bidang manajemen pencatatan



Foto bersama Kepala ANRI Mustari Irawan dengan peserta *Training on Records and Archives Management for Palestine: Management of Electronic Record*



Kepala ANRI, Mustari Irawan, membuka program *Training on Records and Archives Management For Palestine: Management of Electronic Records*.

elektronik/digital. Kedua, pelatihan ini dilakukan untuk menunjukkan simpati dan dukungan Indonesia bagi kebebasan Palestina. Terakhir, ada harapan membangun kesadaran pada catatan dan arsip. Catatan dan arsip adalah tulang punggung administrasi negara. Hanya dengan memiliki kompetensi sumber daya manusia

di bidang pencatatan dan pengelolaan arsip; maka suatu negara dapat mengelola negara mereka.

Pelatihan ini adalah salah satu program prioritas nasional ANRI. Program ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik pada catatan dan manajemen arsip. Program ini telah dilakukan sejak 2009 hingga 2019 dan menjadi perhatian Indonesia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. "ANRI sangat menghargai partisipasi Filipina dalam pelatihan ini sebagai rekan kami yang baik di kawasan ASEAN", ujar Kepala ANRI.

Training Course di laksanakan di Bogor pada 6 Agustus – 11 Agustus 2018 dan diikuti oleh 25 peserta dari Palestina serta 5 peserta dari Filipina. (Inh)

PAMERAN ARSIP PRESIDEN RI



Pameran Arsip Bersejarah era Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo di Aula Serba Guna Gedung 3 Kemensetneg, Jakarta, 27-31 Agustus 2018.

Jakarta, ARSIP. Kementerian Sekretariat Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengadakan Pameran Arsip bersejarah era Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo di Jakarta 27-31 Agustus 2018.

Pameran yang mengangkat tema “Semangat Membangun Negeri” dibuka oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, mewakili Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Senin (27/8/2018), di Aula Serba Guna Gedung 3 Kemensetneg, Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta.

Pameran arsip “Semangat Membangun Negeri” menampilkan parade karya terbaik putra bangsa mulai dari Presiden Sukarno sampai dengan Presiden Joko Widodo.

Arsip yang dipamerkan merupakan

koleksi Kementerian Sekretariat Negara dan ANRI, serta Arsip Nasional Serbia. Pameran Arsip dibagi menjadi 5 sub tema yaitu Semangat Olah Raga, Capaian Pembangunan, Semangat Dari Keluarga, Persatuan Dalam Keberagaman, dan Indonesia Mendunia.

Arsip-arsip tersebut terdiri atas 230 ekspose arsip foto, 20 berkas arsip tekstual, dan arsip video tentang Asian Games, PON, GANEFO, dan olah raga tradisional sebanyak 19 judul.

Dalam sambutannya, Setya Utama berharap pameran arsip ini dapat menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat menikmati, menghargai, dan mengapresiasi warisan sejarah yang bernilai tinggi.

Setya Utama menyampaikan bahwa arsip memiliki peranan yang

penting dalam hal keterbukaan akses informasi. “Melalui pameran arsip, masyarakat akan mendapatkan informasi yang tepat dan benar mengenai sejarah. Arsip mengandung nilai pertanggungjawaban nasional sehingga mampu meng-*counter* informasi atau berita bohong/*hoax*,” ujar Setya.

Pameran arsip yang terbuka untuk umum tersebut akan berlangsung selama 5 hari yaitu dari tanggal 27-31 Agustus 2018, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB.

Tampak hadir dalam acara tersebut adalah Deputy Bidang Konservasi Arsip, M. Taufik; Deputy Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman; Deputy Bidang IPK ANRI, Imam Gunarto; dan pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Sekretariat Negara, dan ANRI.(Inh)

ANRI LAKSANAKAN DIKLAT KEARSIPAN UNTUK PENGELOLA ARSIP TIMOR LESTE

Bali, ARSIP. Badung, Bali. (17/9/2018)– Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan pelatihan dan pendidikan (diklat) kearsipan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis kepada 34 orang pengelola arsip Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Diklat dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Jineng, Kuta, Bali dan dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan (17/9/2018).

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan bahwa kerja sama kearsipan dengan RDTL menjadi salah satu program jangka menengah ANRI, di mana ANRI membangun kerja sama dan sinergitas dengan negara lain, termasuk RDTL. Ditambahkan oleh Mustari, selain berbagi pengetahuan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, ANRI juga siap untuk transfer knowledge tentang e-arsip berikut aplikasinya yang saat ini sudah digagas ANRI. Aplikasi e-arsip tersebut pun dimungkinkan untuk di *customize* sesuai dengan kebutuhan di RDTL.

Sementara itu, pemerintah RDTL melalui Konsulat Jenderal RDTL di Bali, Elda Verera mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang berkenan berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman tentang arsip kepada pengelola arsip di RDTL. Elda pun berpesan agar materi yang diperoleh dari diklat ini dapat diimplementasikan oleh pegawai di tiap instansinya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Velix Vernando Wanggai menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan diklat kearsipan yang menjadi salah satu kegiatan prioritas nasional tahun 2018 dan menjadi bagian dari Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) yang mewujudkan solidaritas, persaudaraan dan persahabatan Indonesia dengan negara-negara berkembang. Lebih lanjut Velix menyatakan bahwa



Kepala ANRI, Mustari Irawan membuka kegiatan Pelatihan dan pendidikan (diklat) kearsipan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis kepada 34 orang pengelola arsip Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Hotel Golden Tulip Jineng, Kuta, Bali (17/9/2018).

pada tahun 2019 Bappenas akan kembali memberikan dukungan untuk keberlanjutan KSST tersebut.

Pada kesempatan pembukaan diklat, turut hadir pula Deputy Bidang Konservasi Arsip ANRI M. Taufik, perwakilan Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Lembaga Kearsipan Daerah provinsi Bali.

Adapun diklat Pengelolaan Arsip Dinamis ini dilaksanakan mulai 16 s.d 22 September 2018. Di mana para peserta akan memperoleh materi mengenai Kebijakan Kearsipan Nasional, Pengantar Kearsipan, Instrumen Kearsipan, Program Arsip Vital dan Pengelolaan Arsip Terjaga, Pengelolaan Arsip Aktif, Pengelolaan Arsip Inaktif dan Penyusutan Arsip, Pengelolaan Arsip Elektronik, dan observasi lapangan di salah satu Lembaga Kearsipan Daerah Bali.

Diklat kearsipan bagi pengelola arsip RDTL ini sebenarnya bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, ANRI juga telah memberikan diklat bagi pengelola arsip di RDTL tentang Pengelolaan Arsip Statis pada 18 s.d

24 September 2016 di Bogor, diklat Pengelolaan Arsip Dinamis pada 2 s.d 8 April 2017 di Jakarta, *Training of Trainers* Kearsipan pada 30 Juli s.d 5 Agustus 2015 di Jakarta.

Adapun pelaksanaan diklat kearsipan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas di bidang pengelolaan arsip dinamis dan statis yang menjadi salah satu butir kerja sama kearsipan antara ANRI dan Arsip Nasional RDTL. Kerja sama kearsipan ini dituangkan dalam Program Eksekutif (Executive Programme) yang telah ditandatangani Sekretaris Utama ANRI, Sumrahadi dan Direktur Jenderal Arsip Nasional RDTL, Senõr Horacio do Santos Marques (25/5/2016) di Jakarta. Sementara itu, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara ANRI dan Arsip Nasional RDTL sebelumnya telah ditandatangani oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan dan Sekretaris Negara bidang Administrasi Pemerintah Timor Leste, Samuel Mendoca (26/1/2016) di Dili. (tk)

ANRI MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2018 KEPADA 34 KEMENTERIAN/LEMBAGA



Penyerahan Hasil Laporan Pengawasan Kearsipan Tahun 2018 kepada 34 Kementerian/Lembaga

Jakarta, ARSIP. Sekretaris Utama ANRI Sumrahyadi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo, di damping oleh Kepala Pusat Akreditasi ANRI Rudi Anton, menyerahkan secara langsung Hasil Laporan Pengawasan Kearsipan Tahun 2018 kepada 34 Kementerian/Lembaga yang di selenggarakan oleh Direktorat Pusat Akreditasi Kearsipan bertempat di ruang serbaguna Swabesi lantai 2 Kementerian Kesehatan RI Jakarta, diharapkan dengan di laksanakan kegiatan pengawasan di bidang kearsipan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2009 di bidang kearsipan karena ANRI sebagai Lembaga pembina di bidang kearsipan mengapresiasi dan memberikan perhatian kepada masing-masing kementerian/Lembaga terhadap pengelolaan arsip yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah di bidang kearsipan, pada kesempatan yang sama juga diumumkan hasil laporan pengawasan kearsipan terhadap 3 (tiga) Kementerian/Lembaga terbaik yang terdiri dari :

- 1.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 2.Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia

Dengan di umumkannya hasil laporan pengawasan kearsipan terhadap 34 kementerian/Lembaga tersebut di harapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian/Lembaga terhadap pengelolaan arsip yang telah tercipta pada setiap kegiatan administrasi pemerintahan dan bisa menjadi bukti akuntabilitas kinerja suatu Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan arsip pemerintah agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud *Good Government* yang bersih dan transparan dalam setiap kegiatan administrasi pemerintah.(mdh)

ANRI MENYERAHKAN APLIKASI SIKD KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)



Kepala ANRI, Mustari Irawan, menyerahkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Yogyakarta, ARSIP. Kepala ANRI, Mustari Irawan, menyerahkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Mustari menyampaikan bahwa implementasi SIKD ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan arsip dinamis berbasis teknologi dan informasi sebagai upaya penyelamatan arsip statis yang merupakan

pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, penyerahan aplikasi SIKD tersebut untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan penyajian informasi di lingkungan Pemerintah DIY dengan menggunakan sistem informasi yang sesuai dengan kaidah kearsipan.

Pada kesempatan yang sama,

Kepala Subdirektorat Daerah IIC, Hanapi Mulyadi, menjelaskan bahwa setelah penyerahan aplikasi SIKD, ANRI juga memberikan bimbingan teknis dalam bentuk praktek SIKD kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah DIY. (SPY)

KEMENHUB SERAHKAN ARSIP STATISNYA KE ANRI DAN CANANGKAN GNSTA

Jakarta, ARSIP. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan arsip statisnya ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip statis Kemenhub diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kepada Kepala ANRI, Mustari Irawan di Kantor Kemenhub, Medan Merdeka Barat, Jakarta (13/11).

Arsip Kemenhub yang diserahkan ke ANRI berisi mengenai kebijakan yang terkait dengan sektor perhubungan dan kerja sama luar negeri sejumlah 42 berkas.

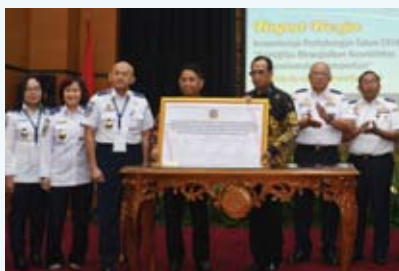
“Kita juga menyerahkan arsip statis bernilai guna sejarah sebanyak 42 berkas yang berasal dari arsip tahun 1972-2003 kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Harapannya ini sebagai langkah awal, supaya ini menjadi satu bagian langkah-langkah awal yang baik bagi pemerintah”, tutur Budi Karya Sumadi dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Kementerian Perhubungan.

Kepala ANRI, Mustari Irawan sangat mengapresiasi penyerahan arsip statis ini. “Saya yakin di dalam proses kegiatan Kementerian Perhubungan akan banyak Arsip yang tercipta. Oleh karena itu, harus kami selamatkan yang nantinya menjadi memori kolektif Bangsa”, ungkap Mustari Irawan

Pada kesempatan ini, dilaksanakan penganangan Gerakan Nasional Sadar



Arsip statis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kepada Kepala ANRI, Mustari Irawan di Kantor Kemenhub, Medan Merdeka Barat, Jakarta (13/11).



Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kementerian Perhubungan

Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai wujud komitmen Kemenhub dalam penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik.

Budi Karya Sumadi mengajak kepada seluruh jajarannya untuk peduli arsip guna mewujudkan

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Kemenhub sehingga tercipta akuntabilitas kinerja organisasi.

Mustari Irawan menyampaikan bahwa GNSTA memiliki sasaran yang akan dicapai. “Sasaran GNSTA meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah”, terang Mustari dalam pemaparan materi mengenai Kebijakan Kearsipan Nasional. (is)

DEPARTEMEN KEARSIPAN KEMENLU RUSIA PERLIHATKAN KHAZANAH ARSIP HUBUNGAN DIPLOMATIK RUSIA-INDONESIA



Moskow-ARSIP (23/11/2018). Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Rusia, Mustari Irawan selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkesempatan memenuhi undangan dari Direktur Departemen Kearsipan Kementerian Luar Negeri Rusia Mrs. Marina. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan pengelolaan arsip perjanjian internasional sejak abad 17 di Kementerian Luar Negeri Rusia. Dalam kesempatan itu Kepala Departemen sejarah Rusia, Mrs. Irina memandu delegasi ANRI untuk mengunjungi fasilitas penyimpanan arsip, preservasi arsip dan ruang baca arsip. Hal ini tentunya dengan keinginan menyampaikan rencana *joint exhibition* arsip Diplomasi Rusia

- Indonesia sebagai peringatan 70 tahun hubungan diplomasi antar kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut Mustari Irawan menyampaikan bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat dimana kita bisa bertukar pengalaman dan pengetahuan terutama terkait teknologi preservasi arsip. Terkait adanya rencana kegiatan pameran arsip bersama dapat memperkuat hubungan diplomasi antar kedua negara, terlebih lagi saat ini ANRI telah memiliki *Memorandum of Cooperation (MoC)* dengan Rosarkiv Rusia, yang sebentar lagi akan ditindaklanjuti dengan *Implementing Arrangement of MoC*".

Pemerintah Rusia menyampaikan

terima kasih atas kunjungan kerja Kepala ANRI beserta delegasi ke Rusia, yang menambah keyakinan bahwa Kerjasama Kearsipan antar kedua negara dapat segera terwujud.

Delegasi ANRI Kunjungi Arsip Federasi Rusia

Dalam rangkaian kunjungan kerja delegasi ANRI ke Rosarkhiv Rusia, delegasi berkesempatan untuk meninjau fasilitas pengelolaan arsip serta khasanah arsip yang disimpan oleh Arsip Federasi Rusia.

Wakil Direktur Arsip Federasi Rusia Mr. Serge menyambut baik kedatangan delegasi ANRI ke Rusia, dan berharap hubungan kedua negara khususnya terkait kearsipan semakin



meningkat. Serge menyatakan bahwa Arsip Federasi Rusia siap bekerja sama dalam mensukseskan penyelenggaraan *joint exhibition* antara ANRI dengan Rosarkhiv mengenai pameran arsip 70 tahun Diplomasi Indonesia - Rusia. Sebagai salah satu unit yang dikoordinasikan oleh Rosarkhiv, mereka akan berusaha mencari arsip-arsip mengenai Indonesia yang ada di Rusia sesuai dengan tema-tema yang dibutuhkan.

Selanjutnya Delegasi ANRI akan dijadwalkan untuk mengunjungi ruang pameran arsip federal yakni Pameran "Solzhenitsyn" dan "Novy Mir (Dunia Baru) bertepatan dengan 100 tahun kelahiran Aleksander Isayevich Solzhenitsyn.

Kerja sama antara Federal Archival Agency of Russia (Rosarkhiv) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan di implementasikan

Dalam rangka menindaklanjuti Implementasi *Memorandum of Cooperation* (MoC) antara ANRI dengan Rosarkhiv yang telah ditandatangani oleh kedua negara di Soci Rusia Tahun 2016, Kepala ANRI beserta delegasi melaksanakan kunjungan kerja ke Rosarkhiv untuk membahas tindak lanjut kerja sama melalui program - program kearsipan yang telah disepakati bersama.

Dalam pertemuan tersebut Mustari menyampaikan bahwa "MoC ini harus segera diimplementasikan oleh kedua belah pihak melalui program- program diantaranya tukar menukar informasi khasanah arsip khususnya hubungan diplomatik kedua negara, *joint exhibition*, transfer teknologi terkait pengelolaan arsip digital, preservasi arsip dan pengembangan SDM Kearsipan kedua negara.

Dalam hal ini Kepala Rosarkhiv

A.N Artizov menerima langsung Kepala ANRI beserta delegasi. Ia menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran Kepala ANRI ke Rosarkhiv untuk membahas tindak lanjut kerjasama. Diharapkan MoC ini dapat segera terimplementasikan mulai tahun 2019 melalui program- program kearsipan yang akan direncanakan bersama. Ditargetkan pada bulan Maret 2019 kedua belah pihak sudah memulai dengan mengirimkan daftar-daftar khasanah arsip yang akan dipertukarkan untuk selanjutnya disusun sebuah naskah sumber arsip yang akan diterbitkan bersama. Selain itu tahun 2020 akan dilaksanakan *joint exhibition* pameran arsip di kedua negara khususnya mengenai peringatan 70 tahun hubungan Rusia-Indonesia. (IT)

PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN E-ARSIP DI FEDERAL ARSIP JERMAN

Berlin-ARSIP. Dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengadakan kunjungan ke Federal Archiv Jerman (Bundes Archiv) pada 21-22 November 2018.

Delegasi ANRI dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman, dengan anggota delegasi Abdul Haris M. Ali, (Kepala Sub Direktorat Kearsipan Daerah 1a, Muhamad Ihwan (Kepala Sub Direktorat Kearsipan Daerah 1b), Dwi Nurmaningsih, (Kepala Sub Direktorat Kearsipan Daerah 1c).

Delegasi ANRI diterima langsung oleh Direktur Bundes Archiv, Dr. Sebastian Barteleit dan staf yang membidangi elektronik arsip, Kristina Yoan.

Dalam kesempatan tersebut delegasi ANRI mendapatkan berbagai informasi terkait dengan pengelolaan arsip elektronik, terutama terkait dengan manajemen arsip digital.

Delegasi ANRI juga berkesempatan mengunjungi depo penyimpanan arsip statis dan berbagai layanan yang dimiliki oleh Bundes Archiv. Selain itu dalam kunjungan ini dijajaki juga kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kedua lembaga, termasuk kepala daerah dan kepala-kepala lembaga kearsipan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain mendapatkan informasi dan pengetahuan dari Bundes Archiv Delegasi ANRI juga menyempatkan diri untuk memberikan Sosialisasi terkait pengelolaan arsip dinamis di



lingkungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin.

Duta Besar RI untuk Jerman Arif Hafas Ugroseno menyambut langsung kehadiran delegasi ANRI dalam kegiatan pembinaan kearsipan tersebut. Ceramah Kearsipan disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan dengan peserta seluruh pejabat dan staf yang ada di Kedubes RI Berlin.

Selain di Berlin, delegasi ANRI juga berkesempatan memberikan pembinaan kearsipan kepada pejabat dan staf pengelola arsip di Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda (23-11-2018).

Di Den Haag delegasi ANRI diterima oleh Wakil Duta Besar RI Fikry Casidy yang mewakili Bapak Duta Besar yang berhalangan hadir. (Den Haag, 24-11-18).

Bahas Pertukaran Arsip Diplomatik, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Temui Atase Kebudayaan dan Pendidikan di Paris

Paris, 25-11-18, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Dr. Andi Kasman, SE.,MM. bertemu dengan Prof. Dr. Surya Rosa Putra, Atase Kebudayaan dan Pendidikan, Wakil Duta Besar RI Paris, Agung Kurniadi, dan Rully F. Sukarno, Ministre Conseiller RI. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka membicarakan fasilitasi pertukaran arsip antara Prancis dan Arsip Nasional RI.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusahakan semua dokumen penting perjalanan hubungan kedua negara (Indonesia dan Prancis) dibidang kebudayaan dan pendidikan diserahkan ke ANRI sebagai lembaga negara yang menyimpan dan memelihara arsip negara. Dengan Wakil Duta Besar RI untuk Paris dibicarakan bagaimana meningkatkan pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kedutaan Besar RI Paris. (MI)

UTUT ADIANTO SAKSIKAN LANGSUNG PENYERAHAN ARSIP STATIS DPR RI KE ANRI

Jakarta, ARSIP-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Utut Adianto turut menyaksikan secara langsung penyerahan arsip statis DPR RI. Arsip statis DPR RI diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar kepada Kepala ANRI yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI (27/11).

Arsip statis di DPR RI yang diserahkan sejumlah 203 boks, dengan rincian arsip konvensional sejumlah 104 boks, arsip media baru terdiri dari kaset audio sejumlah 36 boks, dan audio visual sejumlah 63 boks. “Melalui kegiatan ini pastinya arsip-arsip penting hasil kegiatan Dewan akan terselamatkan. Kami berharap proses cari dan temu kembali suatu dokumen dapat dilakukan secara cepat, tepat, utuh dan lengkap sebagai bahan akuntabilitas kinerja DPR RI”, ungkap Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam laporannya.

Serah terima arsip statis ini merupakan momentum yang sangat berharga karena mewariskan jejak sejarah bangsa Indonesia. “Arsip statis DPR RI yang diserahkan ke ANRI pada hari ini meliputi pembahasan Rancangan Undang-Undang, Risalah Rapat DPR RI, audiensi DPR RI dengan masyarakat, dan Asian International Parliamentary Organisation (AIPO) sebanyak 490 nomor arsip kertas dan 4067 kaset rekaman suara dan video”, ungkap Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi dalam sambutan.

Lebih lanjut Sumrahyadi menambahkan bahwa arsip yang



Penyerahan secara simbolis Arsip statis DPR RI oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar kepada Kepala ANRI yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama ANRI, Sumrahyadi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI (27/11).

diserahkan merupakan memori yang sangat penting bagi generasi mendatang karena menggambarkan informasi tentang suatu fungsi lembaga negara yang mewakili rakyat dalam membangun bangsa dan negara. Berbagai dinamika, keseriusan, dan kerja keras DPR RI tergambar dalam arsip yang akan diserahkan tersebut. “Untuk selanjutnya ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional akan melestarikan dan memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa dan negara”, jelas Sumrayadi.

Sementara itu, Utut Adianto sangat senang dengan acara penyerahan arsip statis DPR RI. “Saya sangat senang dengan acara ini”, tutur Utut. Lebih lanjut Utut menambahkan bahwa penyerahan arsip statis merupakan langkah strategis. “Menyerahkan data arsip itu merupakan langkah strategis. Kita paham, tadi disebut ada 203 boks. Itu *ngeboks-in nya susah*”, terangnya.

Utut menambahkan bahwa keberadaan arsip dapat memberikan gambaran nuansa suatu peristiwa atau sejarah. “Kita ini sekarang sama hal-hal yang sifatnya kesejarahan, hal-hal yang sifatnya produk masa lampau yang kalau kita ikuti jamannya itu sebetulnya sebuah perjalanan yang panjang. Debat-debat di DPR itu bukan hanya sekedar debat. Di situ ada nuansa politik. Di situ ada keberpihakan fraksi-fraksi, kalau ini bisa diarsipkan, sekali lagi salut saya pada Kesekjenan”, ujarnya. Utut menambahkan bahwa apabila terjadi masalah, arsip-arsip itu yang dapat membuktikan benar atau tidaknya masalah itu.

Pada kesempatan ini dilaksanakan pula launching e-arsip, e-library, seminar kearsipan, bedah buku, dan pameran arsip dan perpustakaan DPR RI. (is)

ANRI SELENGGARAKAN EKSPOSE GUIDE ARSIP SOEHARTO, TITIEK SOEHARTO TURUT HADIR

Jakarta, ARSIP-Jakarta (27/11)- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Ekspose Penyusunan Guide Arsip Presiden Kedua RI: Soeharto di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari. Putri keempat Presiden ke-2 RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab dipanggil Titiek Soeharto juga turut hadir dalam acara ekspose ini. Ekspose ini diikuti peserta yang berjumlah 70 orang, berasal dari perwakilan beberapa instansi pemerintah tingkat pusat, perguruan tinggi negeri di wilayah Jakarta dan beberapa yayasan.

Titiek menyatakan bahwa arsip tentang Presiden Soeharto menjadi salah satu warisan yang memiliki nilai yang tinggi bagi anak cucu untuk mengambil pelajaran yang baik untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewakili keluarga Presiden Soeharto, Titiek mengucapkan terima kasih kepada ANRI karena telah mengelola dan melestarikan rekam jejak perjalanan dan pengabdian Presiden Soeharto. "Kami menyambut baik dan bersedia mendukung ANRI dalam peruntutan sejarah perjalanan Soeharto yang terekam dalam arsip. Kami juga yakin ANRI benar-benar menceritakan sejarah yang dilalui Pak Harto, agar masyarakat mengetahui apa yang telah Pak Harto perbuat untuk bangsa ini, termasuk membangun dan memperkokoh pondasi bangsa Indonesia," jelas Titiek.

Berkaitan dengan arsip Presiden Soeharto yang disimpan di ANRI, Deputy Bidang Konservasi Arsip, M. Taufik menyatakan bahwa ada banyak khazanah arsip yang berkaitan dengan Presiden Soeharto yang dilestarikan di ANRI. Untuk bisa diakses, khazanah arsip tersebut harus diolah dan dibuatkan jalan masuknya, salah satunya dengan dibuatkan guide. Ekspose penyusunan guide ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan penyusunan guide yang menjadi salah satu media untuk menghimpun saran dan masukan dari peserta dalam



Putri keempat Presiden ke-2 RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab dipanggil Titiek Soeharto hadir dalam acara Ekspose Penyusunan Guide Arsip Presiden Kedua RI: Soeharto. Pada kesempatan ini, Deputy Bidang Konservasi Arsip, M. Taufik memberikan buku Khazanah Arsip Kepresidenan kepada Titiek Soeharto

penyempurnaan penyusunan guide arsip.

Materi guide arsip ini merupakan hasil penelusuran arsip pada seluruh daftar dan inventaris arsip yang tersedia di unit layanan arsip (Ruang Baca) yang berkaitan dengan peristiwa penting masa pemerintahan Presiden Soeharto periode 1967-1998. Terdapat beberapa jenis arsip yang memiliki informasi tentang Presiden Soeharto, yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip film dan arsip video. Arsip tekstual yang terkait Presiden Soeharto berjumlah 363 nomor, arsip foto berjumlah 633 nomor serta arsip film dan video berjumlah 225 nomor. Adapun informasi dalam guide arsip Presiden Soeharto dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) tema besar, yaitu: Presiden Soeharto dan Politik; Presiden Soeharto dan Pertahanan-Keamanan; Presiden Soeharto dan Ekonomi; Presiden Soeharto dan Pendidikan Kebudayaan; Presiden Soeharto dan Pemuda Olahraga; Presiden Soeharto dan Sosial; Presiden Soeharto dan Hukum; Presiden Soeharto dan Ilmu Pengetahuan Teknologi.

Arsiparis Madya ANRI yang juga selaku Koordinator kegiatan penyusunan guide arsip Presiden Soeharto, Wiwi Diana Sari menjelaskan bahwa bukan hal yang mudah untuk menyusun guide Presiden kedua RI ini, mengingat banyaknya khazanah arsip Presiden Soeharto di ANRI. Oleh karena itu untuk menghimpun masukan dan saran penyusunan guide, dalam sesi diskusi ini menghadirkan dua orang narasumber yaitu: Deputy Direktur Yayasan Damandiri, Soenarto Soedarno dan Direktur Pengolahan, Sarip Hidayat.

Selain membahas tentang pelestarian rekam jejak perjalanan Presiden Soeharto, Titiek juga menyampaikan bahwa diharapkan ANRI juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini. "ANRI mampu berperan dalam menjernihkan dan menyajikan informasi yang autentik kepada masyarakat," ujar Titiek. Taufik juga menambahkan bahwa ANRI juga saat ini bersiap menghadapi era 4.0. (TK)

HUT KORPRI KE-47

PRESIDEN JOKOWI AJAK ASN BERSINERGI DAN BERINOVASI



Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara pada Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Jakarta, ARSIP- Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara pada Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke-47 di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Presiden Joko Widodo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terjebak dalam ego sektoral dan mengajak para ASN dapat saling bersinergi. Lebih lanjut Presiden meminta para ASN untuk memanfaatkan teknologi dan berinovasi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berikut Sambutan Tertulis Presiden Republik Indonesia selaku Penasihat Nasional KORPRI pada Hari Ulang Tahun Ke-47 KORPRI Tahun 2018

Jakarta, 29 November 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya.

Hadirin yang saya hormati,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang Ke-47 ini. Melalui acara ini, kita bisa melakukan refleksi atas apa yang telah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan ke depan.

Selama 47 tahun, Korpri beserta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Korpri telah menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman. Jajaran Aparatur Sipil Negara telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional. Jajaran Aparatur Sipil Negara juga ikut serta menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme.

Atas peran-peran besar tersebut, atas nama seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apa yang telah kita capai sampai hari ini, tidak terlepas dari peran serta jajaran Aparatur

Sipil Negara yang bekerja di semua sektor, semua level pemerintahan, dan semua wilayah di Indonesia serta perwakilan di luar negeri. Apresiasi sebesar-besarnya dari kami untuk para Aparatur Sipil Negara yang bertugas di daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar yang bekerja penuh dedikasi dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Untuk itu, pemerintah selalu memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui peningkatan penghasilan serta dukungan terhadap jaminan kesehatan, perumahan dan pensiun. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih.

Hadirin yang saya hormati,

Upaya untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara harus selalu ditingkatkan. Dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang sangat pesat, Aparatur Sipil Negara juga harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman.

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan lanskap sosial, politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi, terutama pengkomputeran dan media sosial, memang memfasilitasi cara kerja birokrasi. Namun, teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari Aparatur Sipil Negara.

Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan juga dunia usaha untuk menyampaikan aspirasinya tersebut akan menjadi beban Aparatur Sipil Negara jika tidak diikuti dengan perubahan kerja. Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas. Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.



Pada HUT KORPRI ke-47, Tim Angklung ANRI turut berpartisipasi menjadi peserta upacara dan mengisi salah satu rangkaian acara pagelaran seni dan budaya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Oleh karena itu, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di semua lapisan pemerintahan dan di semua sektor, saya minta untuk tidak terjebak dengan ego-sektoral, ego-organisasi, atau ego-programnya masing-masing. Sekali lagi, semua permasalahan yang ada di masyarakat itu bersifat lintas sektoral bahkan juga lintas daerah. Dengan berkolaborasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya yakin Aparatur Sipil Negara bisa mengaktualisasikan baktinya secara lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Hadirin yang berbahagia,

Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam 4 tahun terakhir ini, pemerintah telah memberikan prioritas besar kepada pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, pemerintah membuka keterisolasian, membangun konektivitas, memperkokoh persatuan nasional, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta membangun sentra sentra ekonomi baru.

Mulai tahun 2019, pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat sumberdaya manusia untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor, SDM di semua lapis pemerintahan serta kualitas SDM di usia dini dan remaja, harus ditingkatkan secara signifikan. SDM

kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia dan teknologi yang sedang berubah cepat.

Dalam kaitan ini, saya minta kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara untuk segera memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa. Dengan peran Aparatur Sipil Negara yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, saya yakin transformasi kualitas SDM ini bisa dilakukan secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa.

Kepada seluruh anggota Korpri saya ucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 47, junjung tinggi Panca Prasetya Korpri, dan teruslah berbakti untuk ibu pertiwi.

Terima kasih,

*W a s s a l a m u ' a l a i k u m
warahmatullahi wabarakatuh,*

Om shanti shanti om,

Namo buddhaya,

Pada HUT KORPRI kali ini, Tim Angklung ANRI turut berpartisipasi menjadi peserta upacara dan mengisi salah satu rangkaian acara pagelaran seni dan budaya. Acara HUT KORPRI dihadiri ribuan ASN dari berbagai daerah di Indonesia. (is)